

LAMPIRAN

Lampiran 1. Transkrip Wawancara

A. Narasumber 1

Nama : Sri Hartini, S.Pd., M.Pd.
 Jabatan : Kepala Bidang KPA Dinas P3APPKB Kota Salatiga
 Waktu : Rabu, 15 November 2023, Pukul 07:10 WIB
 Tempat : Kantor DP3APPKB Kota Salatiga

Pertanyaan	Jawaban
Assalamualaikum, selamat pagi Ibu. Terima kasih sudah meluangkan waktunya dan bersedia menjadi narasumber dalam penelitian Tugas Akhir saya. Perkenalkan saya Alfina Oktaviani, mahasiswa semester akhir Ilmu Pemerintahan UNDIP. Sesuai topik dan rencana penelitian saya, saya berniat mewawancarai Ibu perihal pelaksanaan kebijakan Kota Layak Anak pada klaster perlindungan khusus di Kota Salatiga. Apakah Ibu bersedia menjawab pertanyaan-pertanyaan saya?	Waalaikumsalam. Ya, saya bersedia. Silakan dimulai.
Sebelumnya saya jelaskan sedikit tentang penelitian saya. Topik besar dari penelitian saya adalah Kota Layak Anak dengan fokus pada klaster perlindungan khusus dan akan dikaji dari perspektif evaluasi kebijakan. Sehingga yang pertama adalah tentang pelaksanaan kebijakan tersebut. Mengingat di Kota Salatiga tidak ada Perda tentang Perlindungan Anak dan Perda tentang Penyelenggaraan KLA, maka pelaksanaan program perlindungan anak berpedoman pada dasar hukum apa?	Pelaksanaan perlindungan anak langsung berpedoman pada Undang-Undang, yaitu UU Nomor 35 Tahun 2014. Tapi juga ada Peraturan Menteri yang berkaitan dengan Kota Layak Anak, mulai dari penyelenggaraan, instrumen, hingga monitoring dan evaluasi, yaitu Peraturan Menteri PPPA Nomor 11, 12, 13, 14 Tahun 2011. Kemudian diperkuat dengan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021. Serta terdapat Perwali tentang Kota Layak Anak, Nomor 47 Tahun 2018. Sedangkan untuk Perda Perlindungan Anak di Kota Salatiga sedang diupayakan di tahun ini (2023). Naskah Akademik sudah tersusun, hanya saja memang belum diselesaikan menjadi Perda.

<p>Baik Bu. Kemudian fokus pada persoalan kekerasan anak, berdasarkan data yang saya peroleh jumlah kasus kekerasan anak di Kota Salatiga cenderung meningkat. Sejak tahun 2019, setelah Kota Salatiga mendapat predikat KLA tingkat madya, kasus kekerasan anak cenderung meningkat. Berikut adalah datanya, tahun 2018 6 kasus; 2019 (9 kasus); 2020 (9 kasus); 2021 (17 kasus); 2022 (22 kasus); hingga yang terakhir, data per Juli 2023 terdapat 21 kasus. Mengapa demikian? Apa hal yang melatarbelakanginya?</p>	<p>Peningkatan kasus kekerasan anak itu belum tentu tahun sebelumnya tidak sebanyak itu. Mengingat, fenomena kekerasan bisa diibaratkan sebagai fenomena gunung es. Jadi sebenarnya di dalamnya banyak sekali, berjubel, tapi yang tercuat keluar hanya tepi-tepinya saja atau sisi yang mencair hanya luarnya saja. Hal itu tidak bisa disimpulkan kok semakin tahun kasusnya meningkat ya, tetapi lebih banyak faktor keberanian masyarakat untuk <i>speak up</i>, untuk melapor. Sehingga semakin tahun dan dengan bertambahnya data kekerasan, itu sebenarnya menunjukkan peningkatan masyarakat, baik sebagai korban atau yang melihat, berani untuk melaporkan. Hal tersebut juga salah satu pengaruh yang ditimbulkan dari kegiatan apa yang dilakukan oleh Bidang KPA setiap tahunnya kepada masyarakat. Kesimpulannya dengan meningkatnya pelaporan kasus anak bagi kami jadi salah satu bukti tercapainya tujuan klaster perlindungan khusus.</p>
<p>Berkaitan dengan kegiatan yang dilakukan Bidang KPA, apakah kegiatan atau program kerja Bidang KPA dalam perlindungan khusus sudah ditentukan oleh pemerintah pusat? Atau Bidang KPA memiliki keleluasaan dalam menentukan program kerjanya?</p>	<p>Semua kegiatan Bidang tentunya berdasar pada RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah), kemudian mengacu pada Renstra (Rencana Strategis) dan Renja (Rencana Kerja) milik daerah (Kota Salatiga), yang umurnya per lima tahun. Dimana RPJM daerah tersebut, sebelum di-<i>break down</i> ke setiap tahun, harus melalui penyesuaian Renstra dan Renja setiap lima tahun. Sehingga sebenarnya setiap tahun kegiatan yang akan dijalankan harus sesuai dengan dokumen tersebut, yaitu Renja. Renja tersebut pun yang menyusun adalah tim gabungan dari Dinas P3APKB sendiri. Tapi karena kaitannya dengan kebijakan pusat, yaitu KLA, maka Renja juga disesuaikan dengan arahan-</p>

	<p>arahan program dari pusat. Kalau memang di Renja tidak ada poin suatu kegiatan baru, maka kami tidak bisa mengadakan program kerja tersebut. Kalau memang bersifat <i>urgent</i>, kami harus merevisi Renja tersebut dan memasukkan program kegiatan yang memang mendesak harus dilakukan. Tapi ya jarang seperti itu, kami selalu sesuai Renja.</p>
<p>Berkaitan dengan Renja Dinas P3APKKB, apakah Staf Bidang KPA berusaha mencari apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh masyarakat?</p>	<p>Iya Mbak, tapi saya rasa belum semua orang itu <i>dong</i> sama kegiatan Bidang. Kadang diundang saja kan nggak memperhatikan, jadi ya kami biasanya tetap melihat apa <i>to</i> yang terjadi, apa <i>to</i> yang diinginkan masyarakat. Kita usahakan lewat Renja, tapi memang untuk menjangkau semua kemauan ya sulit karena ada pedoman dari RPJMD.</p>
<p>Contoh hal-hal yang sulit dijangkau itu seperti apa Bu?</p>	<p>Kadang masyarakat mikirnya pemerintah <i>kuwi duit e akeh</i>, jadi bisa bikin acara besar, acara yang enak. Tapi kami kan tidak seperti itu, apalagi hubungannya dengan anggaran, ya jelas nggak bisa menuruti kemauan masyarakat. Yang kami utamakan ya kegiatan terlaksana, peserta sesuai sasaran kebijakan, selesai. Nggak bisa kalau nuruti kelompok yang gitu.</p>
<p>Sejalan dengan kegiatan yang harus sesuai dengan RPJM dan Renja, apakah kegiatan Bidang KPA dalam perlindungan anak setiap tahunnya cenderung sama? Apakah ada variasi atau pembeda untuk kegiatan di setiap tahunnya?</p>	<p>Bentuk kegiatan atau program kerja pun akhirnya cenderung berkelanjutan atau berkesinambungan. Terlebih dalam lima tahun, kami harus menyesuaikan kegiatan di Renja dengan RPJM, Renstra, dan peraturan pusat (Menteri PPPA). Meskipun programnya sama, tapi kami akan bedakan sasaran kegiatannya. Karena Kota Salatiga cukup luas dan kelompok penduduknya beragam, terdiri dari empat kecamatan, 23 kelurahan, berbagai tingkatan sekolah untuk anak-anak. Sehingga sasarannya bisa anak sekolah, masyarakat, atau pegawai misalnya guru atau tenaga pendidik. Misalnya untuk program di klaster</p>

	<p>perlindungan khusus yang setiap tahunnya ada, yaitu 2P (Pelapor dan Pelopor), memang sama setiap tahun, tapi ada pembeda dari segi sasaran, materinya juga dikembangkan, model kegiatannya dirancang seperti apa, apakah selalu sosialisasi, diklat, atau diganti <i>fun games</i> seperti <i>outbond</i> dan pengembangan lainnya. Jadi bisa bervariasi, berkembang dan disesuaikan dengan tuntutan zaman.</p>
<p>Mengingat saat ini sudah di penghujung tahun, sehingga rata-rata kegiatan klaster perlindungan khusus atau kegiatan Bidang KPA sudah terlaksana, kegiatan apa yang paling berkesan dan berbeda dari tahun-tahun sebelumnya?</p>	<p>Semua kegiatan Bidang KPA tentu berkesan, karena semua kegiatan memerlukan perencanaan hingga evaluasi. Untuk kegiatan terbaru tahun ini adalah Kongres Forum Anak dan perayaan Hari Anak Nasional.</p>
<p>Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut tentu tidak seutuhnya berjalan mulus. Apa saja kesulitan atau keluh kesah yang dihadapi oleh Bidang KPA? Khususnya yang berkaitan dengan klaster perlindungan khusus.</p>	<p>Jika berbicara tentang hambatan, tentu ada, tetapi untuk hambatan yang berarti bisa dikatakan tidak ada, mengingat semua kegiatan sudah berjalan dengan baik dan lancar. Kemudian berkaitan dengan keuangan juga baik-baik saja. Kalau pun ada hambatan, itu juga umumnya karena kerja tim, seperti komunikasi, koordinasi, dan penyelesaian administrasi. Tapi selama ini komitmen kami di setiap kegiatan harus terlaksana, selesai dengan baik, keuangan baik, jadi bisa kami anggap sudah 90% tereksekusi dengan baik.</p>
<p>Jika berbicara tentang pelayanan yang diberikan oleh Bidang KPA, apakah prosedur pelayanan sudah tersedia dan dapat diakses masyarakat?</p>	<p>Pelayanan yang kami berikan untuk perlindungan anak tentu lebih ke penanganan kasus. Prosedur pelayanan sudah kami <i>upload</i> di media sosial, seperti Instagram dan <i>website</i> DP3APPKB, ada juga yang berbentuk fisik melalui <i>leaflet</i>. Misalnya prosedur pelaporan, alur penanganan, layanan konseling, dan lainnya. Tetapi kalau untuk publikasi penanganan kasus tidak pernah kami lakukan, karena hal tersebut termasuk privasi bagi pihak yang terlibat.</p>

<p>Dalam pelaksanaan klaster perlindungan khusus, apakah Bidang KPA melakukan kerjasama? Pihak mana saja yang terlibat?</p>	<p>Ada kerjasama, yang pertama kerjasama internal dalam satu Dinas. Tidak menutup kemungkinan dalam suatu penanganan kasus Bidang KPA bekerjasama dengan Bidang PP (Pemberdayaan Perempuan) dan Bidang KB (Keluarga Berencana), serta Sekretariat untuk keperluan surat menyurat. Kalau di luar Dinas, ada banyak kerjasama antar instansi. Misalnya Dinas Pendidikan, berkaitan dengan kasus-kasus yang terjadi di sekolah; kemudian dengan Kemenag apabila kaitannya dengan sekolah-sekolah Islam atau Nasrani; kemudian Dinas Sosial, untuk menyiapkan rumah aman apabila anak membutuhkan rehabilitasi; Dinas Kesehatan, apabila dalam penanganan kasus ditemukan pihak/ keluarga yang membutuhkan konseling tentang kesehatan; RSUD, kaitannya dengan visum dan sebagainya; Polres kaitannya jika masuk ke dalam ranah hukum; Pengadilan Agama; serta Pengadilan Negeri. Kemudian juga ke praktisi akademisi, seperti UKSW dan UIN Salatiga untuk bantuan hukum.</p>
<p>Baik Bu, instansi-instansi yang bekerjasama tersebut cenderung pada sektor pemerintahan. Apakah ada kerjasama dengan pihak ketiga di luar pemerintahan? Seperti pihak swasta atau LSM.</p>	<p>Ada. Kerjasama umumnya dengan yayasan swasta yang menyediakan <i>safe house</i>. Misalnya Yayasan Pesan di Kota Salatiga, pondok pesantren tunjukan, dan panti asuhan. Kerjasama tersebut ditujukan untuk anak yang dalam penanganan kasus ternyata memerlukan pengasuhan alternatif. Kami juga termasuknya melakukan kerjasama ya, melalui dana CSR dari perusahaan di Kota Salatiga.</p>
<p>Bagaimana koordinasi dilakukan dengan pihak-pihak tersebut?</p>	<p>Untuk memulai suatu kerja tim yang melibatkan pihak lain, biasanya kami melakukan rapat internal Dinas P3APPKB terlebih dahulu. Kemudian rapat koordinasi dengan seluruh tim (gabungan dengan instansi lain), diadakan setiap tahunnya antara 2-3</p>

	<p>kali. Rapat koordinasi tersebut dilakukan untuk melakukan rekap semua kasus, baik yang selesai maupun tidak selesai (oleh Dinas P3APPKB). Untuk kasus yang belum terselesaikan, akan kami buka di rapat tersebut dan diselesaikan bersama-sama. Sedangkan pada saat penanganan kasus berjalan, koordinasi dilakukan secara langsung. Misalnya di tengah penanganan kasus ditemukan hal yang memerlukan bantuan Dinas Sosial, maka Bidang KPA langsung menghubungi atau bersurat Dinas Sosial, jadi dilakukan sambil jalan.</p>
<p>Berkaitan dengan perlindungan anak, bagaimana Bidang KPA menangani kasus anak yang berhadapan dengan hukum? Baik sebagai pelaku (terlapor) dan korban.</p>	<p>Jika pada suatu kasus yang memang masuk ke ranah hukum dan pelaku masih berada di jenjang usia anak, maka menjadi kewenangan ranah hukum sendiri, dalam hal KLA berarti di bawah Polres. Tapi memang kami masih melakukan pemantauan, sehingga mendapat laporan kondisi dari kasus yang demikian. Untuk anak berhadapan dengan hukum (ABH) akan ada dua jalan, (1) dikembalikan ke orang tua jika berkenan atau (2) masuk ke pengasuhan alternatif. Jadi memang tidak dimasukkan ke tahanan atau sel tetapi tetap dalam pantauan polisi melalui dua pilihan tersebut. Di lain sisi, ABH juga tetap harus melakukan wajib lapor.</p>
<p>Berapa proses penanganan ABH atau diversi hukum yang diberikan sejak tahun 2019?</p>	<p>Hanya ada satu, di tahun 2021. Itu pun kami tidak bisa menyampaikan secara jelas hal apa yang menjadikan anak berhadapan dengan hukum, karena ranah ini juga bagian dari kerjasama dengan pihak kepolisian dan bagian dari kode etik kami maupun privasi anak.</p>
<p>Selain berbicara tentang penanganan kasus kekerasan anak, klaster perlindungan khusus juga mencakup upaya penanggulangan bencana yang memperhatikan kepentingan anak.</p>	<p>Berkaitan dengan penanggulangan bencana di tingkat kota, Kota Salatiga ada BPBD ya. BPBD Kota Salatiga juga terhitung baru ada, per tahun 2020 baru diresmikan melalui Perda. Dinas</p>

<p>Bagaimana mekanisme penyusunannya? Apakah sudah melibatkan anak dan mementingkan hak anak?</p>	<p>P3APPKB, termasuk Bidang KPA memang dilibatkan dalam rapat koordinasi dan pengusulan penanggulangan bencana. Tapi karena memang baru terbentuk (BPBD), jadi kegiatan yang melibatkan anak pun sejauh ini belum ada. Kami (Bidang KPA) juga baru terlibat dalam rapat-rapat saja.</p>
<p>Bagaimana pembiayaan pelaksanaan program kerja pada klaster perlindungan khusus?</p>	<p>Klaster perlindungan khusus dibiayai oleh dua sumber, yaitu APBD dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Meskipun begitu, untuk realisasi dan penganggarannya tentu disesuaikan dengan arahan Pemkot Salatiga.</p>
<p>Kalau boleh tahu, apakah dari awal Kota Salatiga menyelenggarakan kebijakan KLA, setiap klaster memiliki alokasi anggaran sendiri-sendiri Bu? Jadi misal klaster hak sipil sekian, klaster pendidikan sekian, dan sebagainya.</p>	<p>Tidak Mbak. Setahu saya baru ada saat tahun 2021, karena perlindungan bagi anak dengan kondisi darurat atau anak sebagai korban kekerasan baru menjadi masalah yang <i>digatekke</i> pemerintah. Jadi tahun sebelumnya anggaran dijadikan satu dengan kegiatan klaster lainnya. Bahkan sebelum disatukan jadi DP3APPKB, lebih banyak anggaran perlindungan khusus anak itu masuknya ke Dinas Sosial.</p>
<p>Baik Bu. Kembali ke Dana Alokasi Khusus yang merupakan unsur dari APBN ya Bu, jadi bisa disimpulkan jika penganggaran kegiatan klaster perlindungan khusus bersumber dari APBN dan APBD. Namun dari dokumen resmi DP3APPKB yang diunggah di situs Dinas, disebutkan jika alokasi klaster perlindungan khusus hanya bersumber dari APBD, bagaimana ya Bu?</p>	<p>Oh iya Mbak, maaf maaf, kalau begitu maksud saya untuk penganggaran klaster perlindungan khusus sumbernya dari APBD ya Mbak, itu macam-macam bisa dari pajak, bagi hasil, begitu. Terus kalau dari dunia usaha yang mengadakan dana untuk kegiatan Dinas biasanya tidak tetap dan tergantung keadaan. Bentuknya juga beda-beda, seringkali tidak berupa dana tapi bantuan tempat acara atau sponsor lain gitu.</p>
<p>Bentuk <i>support</i> dari kedua perusahaan tersebut dalam pelaksanaan klaster perlindungan khusus tahun ini apa saja ya Bu?</p>	<p>Kalau dari Unza Vitalis kemarin memberi sponsor produknya, parfum itu <i>to</i> Mbak untuk <i>goodie bag</i> anak-anak di perayaan HAN. Kalau PT. SCI bentuknya suntikan dana untuk menangani anak-anak yang dititipkan di rumah aman, salah satunya kita salurkan ke Yayasan Pesan.</p>

<p>Bagaimana dengan alur penganggarannya Bu?</p>	<p>Alurnya setelah menyusun Renja dan RAD KLA, Bidang pasti melakukan penyusunan anggaran kegiatan dan diketahui oleh Bagian Keuangan Dinas. Kemudian dari Bidang langsung kita ajukan ke Bappeda dan Bagian Keuangan Kota Salatiga. Di masa ini akan dipastikan apakah ada yang perlu diturunkan, diubah atau nggak, dan disesuaikan dengan anggaran kota. Baru setelahnya kita ikut Diseminasi dengan Bappeda, mana yang bisa direalisasi, mana yang tidak bisa, mana yang harus dikurangi, gitu. Setelah sepakat dalam Diseminasi itu, ya akan dijalankan kegiatan dan penganggarannya. Tanggung jawab setelah kegiatan adalah menyusun SPJ, yang isinya menjelaskan pelaksanaan kegiatan sekaligus keuangannya.</p>
<p>Apakah dalam alur penganggaran hingga selesai kegiatan, pada klaster perlindungan khusus pernah mengalami kesulitan atau kendala?</p>	<p>Sejauh ini tidak ada ya Mbak, ya revisi kecil-kecilan ada, tapi saat Diseminasi selalu aman dan diloloskan semua. Kalau pun ada dalam pemeriksaan oleh Inspektorat atau Badan Pengawas BPKD masih bersifat administratif. Misalnya kelengkapan SPJ, kurang surat atau dokumen apa, gitu. Tidak pernah ditemukan pelanggaran yang fatal. Pernah ada di Dinas ini, tapi di Bidang lain.</p>
<p>Kalau begitu pelapor maupun korban yang ditangani tidak mengeluarkan biaya sepeserpun ya Bu?</p>	<p>Iya gratis semua Mbak. Semua sudah ditanggung pemerintah karena ada alokasinya. <i>Piye?</i> Enak <i>to</i> sekarang. Asal masyarakat melapor, pasti akan kita layani.</p>
<p>Bagaimana untuk anak dengan kondisi kurang baik Bu? Dalam artian secara fisik kurang sehat, lingkungan tinggal kurang nyaman, apakah ada upaya dari Bidang KPA untuk membantu anak yang ditangani dengan kondisi demikian?</p>	<p>Oh iya jelas Mbak kalau itu. Biasanya kita lakukan setelah kasus selesai, tapi kita masih monitor. Waktu itu misal kita kasih paket bahan makanan sehat seperti susu khusus menaikkan berat badan, telur, beras. Terus ada kebutuhan kesehatan, misal anak yang mengalami kekerasan fisik harus ganti perban, itu ya kita kasih, butuh kateter, bahkan saat dia mau kontrol rutin bisa</p>

	kok kita sediakan angkutan dan sopirnya, ya pakai dari Dinas.
Baik Bu bisa saya pahami, berarti untuk anggaran kegiatan klaster perlindungan khusus <i>clear</i> ya Bu.	Ya Mbak. <i>Njenengan</i> malah lebih teliti. Maaf ya, soalnya urusan anggaran biasanya yang <i>ngurus</i> langsung penanggung jawab klaster ke Bagian Keuangan.
Baik Bu. Beralih ke persoalan tenaga kerja ya Bu. Bagaimana sumber daya atau tenaga yang dimiliki Bidang KPA dalam melaksanakan klaster perlindungan khusus?	Dalam pelaksanaan klaster perlindungan khusus melibatkan seluruh staf Bidang KPA. Sedangkan untuk penanganan kasus seperti kekerasan pada anak, anak yang berhadapan dengan hukum, penelantaran, dan kasus lain, akan dihandle oleh tim gabungan yaitu Tim P2TP2A. Tim P2TP2A terdiri dari DP3APPKB dan Dinas-Dinas lain yang sudah disebutkan sebelumnya. Tapi memang pada penanganan awal, selalu dilakukan oleh tim internal DP3APPKB. Tim internal ini mencakup Bidang KPA dan PP (Pemberdayaan Perempuan). Mengapa begitu? Karena umumnya kasus kekerasan atau pelecehan terjadi di rumah tangga, melalui KDRT. Sehingga jika terjadi pada istri, maka anak juga terkena akibatnya.
Berkaitan dengan kompetensi sumber daya yang terlibat, apakah setiap anggota dalam tim memiliki kecakapan atau sertifikasi tertentu?	Setidaknya tim yang tergabung memiliki sertifikasi KHA (Konvensi Hak Anak), penanganan kasus, penyelesaian kasus dalam rumah tangga, hingga konselor. Selain itu, sumber daya yang terlibat, khususnya tim inti ada yang memang sejak awal sudah berkecimpung di psikologi, baik keilmuan maupun praktisnya. Jadi dalam tim kami tidak hanya staf dengan jabatan tertentu, tetapi memang ada tenaga ahli yang membidangi hal terkait. Sehingga harapannya sejak penanganan awal, tim inti mampu memetakan penyelesaian suatu kasus.
Berapa banyak waktu yang dialokasikan oleh Bidang KPA dalam	Dalam penanganan kasus dan pelaksanaan kegiatan klaster

<p>pelaksanaan klaster perlindungan khusus?</p>	<p>perlindungan khusus kami tidak bisa menentukan alokasi waktu. Kami cenderung mengikuti alur dan proses penanganannya, tetapi berdasar SOP, begitu ada laporan maka kami upayakan untuk penanganan awal tidak lebih dari 3X24 jam. Kemudian dilakukan klarifikasi awal dengan pelapor dan untuk langkah selanjutnya, apakah berlanjut mediasi, pendampingan psikologi, <i>assessment</i>, atau kemudian ke ranah hukum prosesnya berjalan. Jadi tergantung pada bagaimana kasus tersebut berjalan dan juga bergantung pada partisipasi dari pelapor maupun terlapor. Kalau pelapor pro aktif dan komitmen dengan laporan awal, maka bisa segera diselesaikan. Dengan begitu kami tidak bisa memberi alokasi waktu yang tepat seperti kasus A selesai dalam sekian hari atau sekian bulan. Bahkan kami punya kasus di tahun 2022 yang sampai sekarang belum selesai, karena ada pengaruh dari hasil mediasi, dimana kami harus menunggu usia anak 12 tahun. Jadi memang semuanya tergantung pada proses.</p>
<p>Dengan begitu, apakah pernah staf bidang atau tim yang menangani kasus harus bekerja di luar jam kerja?</p>	<p>Iya, bisa terjadi. Misalnya saat kami harus melakukan penjangkauan ke rumah korban di luar jam kerja. Kemudian dalam pendampingan psikologis, pendampingan visum, penjemputan di rumah aman, dan sebagainya kami juga bergantung pada kesanggupan korban, tergantung pada situasi dan kondisi.</p>
<p>Kemudian masuk ke bagian akhir dari daftar pertanyaan, sebagai bentuk pertanggungjawaban, apakah terdapat rapat internal di akhir pelaksanaan program klaster perlindungan khusus?</p>	<p>Ada, biasanya rapat internal kami lakukan setelah mediasi kasus terakhir. Di mediasi terakhir tersebut kami sampaikan pada kedua pihak bahwa <i>output</i> dari penanganan kasus misalnya surat pernyataan yang ditandatangani kedua pihak, surat keterangan, atau kesepakatan lainnya. Sekaligus juga kami sampaikan jika kasus resmi</p>

	<p>ditutup. Sehingga di hari selanjutnya sudah tidak ada penanganan untuk kasus tersebut. Setelah pertemuan dengan kedua pihak tersebut, tim internal DP3APPKB juga akan melakukan rapat, menyampaikan hasil atau laporan selama penanganan, evaluasi dari tim, dan membuat kesepakatan jika kasus tertentu telah selesai. Biasanya kami sebut agenda tersebut sebagai terminasi.</p>
<p>Kemudian di akhir pelaksanaan program kegiatan, dari masyarakat, khususnya pengguna pelayanan perlindungan khusus adakah kritikan? Apa saja bentuknya?</p>	<p>Tentu untuk kritik sering kami terima, terutama ketidakpuasan pengguna layanan atau pelapor. Kemarahan terlapor juga sering kami terima. Tetapi sebagai pelaksana program dan bagian dari pemerintah, kami selalu berusaha sesuai prosedur. Kami dari awal selalu menyampaikan bahwa kami (tim penanganan kasus) adalah pihak netral yang tidak memihak siapa pun, sekali pun itu pelapor. Karena bersifat netral dan menyediakan pelayanan, tujuan kami adalah membantu menyelesaikan masalah. Siapa yang seharusnya benar menurut kami, dan siapa yang ada di sisi berlawanan akan kami sampaikan. Nah langkah yang demikian seringkali memicu ketidakpuasan pelapor, karena kami tidak memihak dan memicu kemarahan terlapor. Meskipun begitu, kami juga menyampaikan jika kami berbeda dengan ranah hukum. Jika saudara menginginkan ranah hukum, silakan prosesnya dibawa ke kepolisian. Kami sebagai instansi pemerintahan tidak memperlakukan pengaduan layaknya kepolisian, tapi lebih kepada penanganan secara kekeluargaan yang terorganisir, yaitu mediasi. Jika memang kasus dibawa ke ranah hukum, kami juga tidak ikut mencampuri, langkah kami akan berhenti disitu. Kemudian juga kami menyampaikan jika hasil dari mediasi tidak selalu sesuai dengan harapan</p>

	<p>awal. Semuanya tergantung pada pelapor dan terlapor. Kalau hasil mediasi tidak sesuai harapan, maka kami menegaskan itu yang terbaik yang bisa kami lakukan. Bekerja sesuai SOP dan mengedukasi sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Jadi pihak yang terkait dalam laporan harus merelakan, melepaskan ego, dan <i>legowo</i>.</p>
<p>Selain kritik dari masyarakat, adakah saran yang kemudian diterima dan sudah diterapkan oleh Bidang KPA dalam pelaksanaan klaster perlindungan khusus?</p>	<p>Ada, dan umumnya lebih ke proses penanganan kasus. Misalnya karena ada benturan waktu antara penanganan kasus dengan kegiatan Dinas lainnya. Selain itu juga ada pihak dalam kasus yang menanyakan suatu hal, mengkonsultasikan masalah, atau melaporkan di luar jam kerja. Sehingga masyarakat cenderung memberi kritik pada waktu pelayanan yang akhirnya kami respon dengan menegaskan adanya SOP waktu pelayanan. Dimana di dalam SOP ditekankan jika segala bentuk pelayanan dan penanganan kasus setelah pukul 16.00 WIB akan ditangani pada hari atau jam kerja berikutnya. Kecuali yang memang <i>urgent</i>, seperti kasus bentrok anak tahun lalu yang sampai bonyok dan harus di visum saat itu juga.</p>
<p>Bagaimana respon dan penilaian masyarakat terhadap pelayanan Bidang KPA, khususnya dalam ranah klaster perlindungan khusus?</p>	<p>Pada saat ada pelaporan, kami akan meminta masyarakat membuat penilaian terhadap penanganan awal kami. Sejauh saya menjabat, jawaban cenderung positif dan puas. Tapi tidak menutup kemungkinan ada jawaban yang tidak puas, umumnya karena masalah waktu penanganan yang mereka rasa lambat. Selain dari masyarakat, saya pun dan beberapa staf Bidang KPA merasa kalau kami belum pernah melakukan jajak pendapat kepuasan publik yang kaitannya dengan penanganan kasus.</p>
<p>Selaku Kepala Bidang KPA, apakah Bidang KPA dan tim penanganan kasus</p>	<p>Tentu sebagai kepala bidang saya mengapresiasi kerja tim kami. Tapi</p>

<p>dalam klaster perlindungan khusus sudah memberikan yang terbaik?</p>	<p>memang sampai saat ini masih ada kendala-kendala di lapangan seperti komunikasi dan koordinasi. Hal tersebut saya maklumi karena dalam satu tim (bidang), tidak hanya melakukan penanganan kasus, tetapi juga menjalankan kegiatan Dinas lainnya. Jadi yang sering saya tekankan kepada tim adalah perbanyak komunikasi dan koordinasi di WAG, serta saling mengingatkan tentang kasus-kasus yang sedang ditangani agar tidak terlewat atau melebihi waktu seharusnya.</p>
<p>Selain penilaian kerja tim, menurut Ibu Kabid KPA, apakah program dari Bidang KPA khususnya pada klaster perlindungan khusus sudah membawa dampak positif bagi pemenuhan hak anak dan perlindungan anak di Kota Salatiga?</p>	<p>Menurut saya tentu sudah, terlebih jika dibandingkan dengan tahun-tahun lalu, lima tahun lalu. Dengan bertambahnya pelaporan kasus pun dapat saya artikan jika kegiatan edukasi yang kami lakukan pada masyarakat telah berhasil, meskipun bertambahnya secara perlahan atau sedikit-sedikit. Itu tandanya juga masyarakat sudah paham konsep melindungi dirinya sendiri dan orang di sekitarnya. Karena memang kegiatan di klaster perlindungan khusus difokuskan untuk hal tersebut. Di tahun ini kami juga memiliki satu inovasi di Bidang KPA yaitu <i>Kondo Joko</i>, yaitu singkatan dari <i>Konco Dijogo Ojo Rekoso</i>. Maksudnya apabila melihat atau mendengar teman mengalami kekerasan, harus kita jaga dengan cara melaporkannya, agar teman tersebut tidak kesulitan atau <i>rekoso</i>. Harapannya dengan inovasi tersebut semakin banyak masyarakat dan anak-anak yang mau <i>speak up</i> jika melihat atau mendengar kasus kekerasan di sekitarnya. Sedikit tambahan pula dari saya dan tim, kota yang aman atau baik tentu tidak bisa dan tidak mungkin dicirikan dengan angka 0 kekerasan pada anak dan perempuan, tetapi dicirikan dengan banyaknya pelaporan dan penanganan</p>

	yang tepat dan baik. Hal itulah yang harusnya menjadi tolok ukur dari kualitas perlindungan anak di suatu wilayah.
Baik Ibu, terima kasih atas penjelasan yang rinci. Kiranya pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya ajukan cukup untuk membangun argumen dalam penelitian dan menjawab hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan Kota Layak Anak pada klaster perlindungan khusus di Kota Salatiga. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kesediaannya ya Bu.	Oh iya Mbak sama-sama. Saya juga terima kasih karena Mbak Fina sudah datang lagi ke Bidang KPA. Semoga penelitiannya berjalan lancar ya.

B. Narasumber 2

Nama : Tites Sri Dewi, S.Psi., M.Psi. (Psikolog)
 Jabatan : Psikolog Klinis DP3APPKB dan Pelaksana Teknis Klaster Perlindungan Khusus kebijakan Kota Layak Anak
 Waktu : Kamis, 16 November 2023, Pukul 11.00 WIB
 Tempat : Kantor DP3APPKB Kota Salatiga

Pertanyaan	Jawaban
Assalamualaikum, selamat pagi Ibu. Terima kasih sudah meluangkan waktunya dan bersedia menjadi narasumber dalam penelitian Tugas Akhir saya. Perkenalkan saya Alfina Oktaviani, mahasiswa semester akhir Ilmu Pemerintahan UNDIP. Sesuai topik dan rencana penelitian saya, saya berniat mewawancarai Ibu perihal pelaksanaan kebijakan Kota Layak Anak pada klaster perlindungan khusus di Kota Salatiga. Apakah Ibu bersedia menjawab pertanyaan-pertanyaan saya?	Waalaikumsalam. Ya, saya bersedia. Silakan dimulai.
Untuk memulai wawancara ini, silakan Ibu memperkenalkan diri, meliputi nama, pekerjaan atau tanggung jawab di instansi, dan lama bekerja.	Baik selamat siang, perkenalkan saya Tites Sri Dewi Pratiwi, saat ini di DP3APPKB saya menjadi psikolog klinis dan saya sudah bekerja disini selama tiga tahun terhitung dari tahun 2020 hingga saat ini.

<p>Baik Bu, terima kasih, salam kenal. Dengan lama waktu bekerja tersebut, lebih spesifiknya sebagai penanggung jawab pelaksanaan klaster perlindungan khusus kebijakan KLA sudah dimulai sejak awal bergabung atau tahun berapa?</p>	<p>Sebenarnya untuk penanggung jawab klaster perlindungan khusus pasti langsung ke atasan saya yaitu Ibu Kabid KPA. Disini saya menjadi pelaksana teknis klaster tersebut. Hal tersebut saya mulai dari tahun 2021.</p>
<p>Kalau begitu di Dinas ini, Ibu mengemban dua tugas secara bersamaan ya? Apakah ada kesulitan yang dialami Bu? Misal dalam membagi waktu kerja antar tanggung jawab.</p>	<p>Iya betul Mbak. Jadi pelaksana teknis iya, jadi yang menangani klien juga iya. Kadang ya bentrok Mbak, tapi pada akhirnya bisa terselesaikan kok.</p>
<p>Baik, untuk pertanyaan pembuka saya cukupkan. Kemudian beralih pada pertanyaan inti yaitu berkaitan dengan pelaksanaan klaster perlindungan khusus di Kota Salatiga. Bagaimana keberjalanannya?</p>	<p>Pelaksanaan klaster perlindungan khusus dalam rangka mencapai Kota Layak Anak sebelum saya bergabung sudah dilakukan beberapa teknis di lapangan. Dengan bergabungnya saya pada tahun 2021 tentu meneruskan program dan teknis lapangan dari sebelumnya, hanya saja dalam keberjalanannya, terdapat teknis yang kami adaptasi ulang. Misal saat kami akan melakukan pengumpulan data KLA, monitoring dan evaluasi yang dilakukan melalui koordinasi langsung. Kemudian adaptasi pula dengan kondisi pandemi yang lalu, kami melakukan koordinasi dan sebagian besar pelaksanaan perlindungan anak melalui <i>chat</i>, telepon, dan <i>video call</i>, karena adanya pembatasan aktivitas tatap muka. Kemudian untuk teknis lapangan, beberapa juga ada yang kami perbarui. Misal dalam pengumpulan data pelaksanaan klaster perlindungan khusus untuk bahan evaluasi KLA pada setiap OPD atau Dinas, kami gunakan <i>Google Drive</i>. Selain itu kami juga membantu OPD yang bekerjasama dalam pelaksanaan klaster perlindungan khusus, terutama saat akan penilaian KLA dengan memetakan hal-hal yang harus dikerjakan dan dipenuhi setiap OPD. Misal terkait ABH, Dinas mana saja</p>

	<p>yang terkait, apa yang harus mereka siapkan dan kerjakan, begitu dan sebagainya. Gunanya apa? Untuk mempermudah setiap instansi dalam bekerja, sehingga meminimalisir tumbukan atau kekeliruan <i>job desc</i>. Kemudian berkaitan dengan koordinasi tim dan penanganan kasus, jika memang terhalang oleh situasi dan jarak bisa dilakukan melalui <i>WhatsApp</i> dan <i>video call</i>.</p>
<p>Berkaitan dengan perlindungan khusus, tentu menyangkut pada kasus kekerasan terhadap anak di Kota Salatiga. Bagaimana perkembangannya? Terlebih setelah Kota Salatiga mendapat predikat KLA tingkat madya.</p>	<p>Peningkatan kasus kekerasan anak dari data yang ada dan menurut saya sebagai pelaksana teknis, di Kota Salatiga tentu meningkat. Artinya jika data meningkat bukan berarti kota kita jelek dan tidak aman untuk anak-anak, melainkan dapat diartikan positif karena masyarakat semakin sadar akan apa yang terjadi di sekitarnya. Masyarakat diartikan sadar ketika mereka mengetahui ada kekerasan atau tindakan tidak sepatutnya dan melaporkannya. Untuk saat ini sudah sangat meningkat dan lebih baik dari tahun 2019-2020. Jadi kami yakin kalau upaya kami lewat banyak kegiatan perlahan ternyata juga mencapai tujuan pemenuhan klaster perlindungan khusus.</p>
<p>Adanya peningkatan data kekerasan yang diartikan pelaporan berjalan lebih baik, apa saja jenis kekerasan yang dilaporkan masyarakat?</p>	<p>Jika kita berbicara jenis itu ada banyak dan beragam. Ada kekerasan seksual, kekerasan fisik, yang mana dari dua jenis kekerasan tersebut tentu berpengaruh pada terjadinya kekerasan psikologis. Sedangkan di lain sisi juga ada kasus yang terjadi karena ketidakmampuan secara ekonomi, misalnya penelantaran anak. Misal dalam pelaporan kasus KDRT, rata-rata mengarahnya pada kekerasan fisik. Selain pelaporan kekerasan, di klaster perlindungan khusus kami juga menangani permasalahan hak asuh anak, perceraian, dan masalah lain yang ranahnya ke ekonomi.</p>

<p>Berkaitan dengan jenis kasus yang dilaporkan dan ditangani dalam klaster perlindungan khusus, apa saja latar belakang atau penyebab yang banyak ditemui dari kasus-kasus tersebut?</p>	<p>Sejalan dengan laporannya, umumnya di Kota Salatiga adalah kenakalan anak, ketidakharmonisan keluarga, dan permasalahan ekonomi di dalam rumah tangga.</p>
<p>Baik, jika berbicara tentang faktor yang mempengaruhi seorang anak mendapat perlindungan khusus, apakah ada faktornya?</p>	<p>Seorang anak dinyatakan bisa mendapat perlindungan khusus itu kami dasarkan atau sesuaikan pada peraturan perundangan, yaitu PP Nomor 75 Tahun 2021, pada Pasal 3. Di dalamnya diterangkan ada 15 kriteria yang menjadikan seorang anak mendapat perlindungan khusus. Di antaranya ada anak berhadapan hukum (ABH), anak yang berhadapan dengan situasi darurat, anak mendapat kekerasan fisik, kekerasan psikis, darurat bencana, dan sebagainya. Jadi memang sudah ada kriterianya untuk mendapat pelayanan pada klaster perlindungan khusus.</p>
<p>Berkaitan dengan pelayanan dan program kerja dalam klaster perlindungan khusus yang diselenggarakan di Kota Salatiga, apa saja bentuknya?</p>	<p>Dalam pelaksanaan program kerja klaster perlindungan khusus yang dijalankan oleh DP3APKKB khususnya Bidang KPA, meranah tiga sasaran. Pertama, program kerja atau kegiatan yang sifatnya preventif atau pencegahan. Bentuk kegiatannya berupa sosialisasi, psikoedukasi, bahkan adanya siaran-siaran di radio daerah terkait dengan cegah kekerasan dan anti <i>bullying</i>. Sasaran dari kegiatan tersebut tidak hanya masyarakat umum, tetapi juga dari unit terkecil masyarakat yaitu lingkungan RT dan RW. Kemudian ke sekolah-sekolah dengan peserta siswa dan guru, dimana kami juga membentuk agen perubahan dalam mencegah kekerasan yang kami sebut sebagai Agen 2P, Pelopor dan Pelapor. Setelah upaya preventif, ternyata tetap tidak bisa dihindari adanya kasus kekerasan. Dalam ranah kedua ini kami melakukan langkah kuratif. Ketika ada kasus dan pelaporan, kami langsung melakukan</p>

penanganan. Proses penanganan kami lakukan setelah adanya pelaporan, yang mana bentuk pelaporan ada dua, yaitu secara langsung atau datang dan tidak langsung. Jika pelapor datang, kami akan langsung melakukan pelayanan berupa analisis kasus. Analisis kasus ditujukan untuk memetakan kebutuhan atau intervensi yang nantinya akan dilakukan pada si korban. Tetapi jika korban dan atau laporan tidak dilakukan langsung, kami akan menjadwalkan penjangkauan untuk melakukan analisis awal. Jika jarak si korban terlalu jauh, maka kami akan melakukan analisis awal melalui *video call*. Kemudian dalam kegiatan kuratif ini, jika korban membutuhkan bantuan yang sifatnya segera, kami juga akan memberikan trauma *healing*, jadi memang semuanya tergantung kondisi saat pelaporan dan analisis awal. Kemudian bentuk kegiatan ketiga adalah rehabilitatif, ini dilakukan setelah proses penanganan kasus. Jadi kami tidak melepas kasus ya, tapi ada yang namanya proses rehabilitatif berupa monitoring. Monitoring ini kami lakukan secara berjangka, misal dua minggu sekali menanyakan bagaimana perkembangan psikisnya? Apakah ada perkembangan juga dari pelaku? Jika kasusnya KDRT, apakah si ayah masih melakukan tindakan? Dan bentuk *follow up* lainnya. Selain ketiga bentuk tersebut, ada satu tambahan yang kami lakukan yaitu langkah variatif. Kalau rehabilitatif kan cenderung dalam waktu dekat setelah penanganan kasus selesai, tapi kalau variatif ini biasanya setelah jauh berlalu kami masih memantau. Biasanya kami lakukan lewat psiko sosial di lingkungannya, misal dari pelapor yang ternyata pamannya, gurunya, atau tetangganya.

<p>Terima kasih atas penjelasan yang lengkap Bu. Kemudian saya ingin menanyakan tentang jumlah anak yang mendapat perlindungan dari tahun ke tahun. Adakah data tersebut?</p>	<p>Pasti untuk <i>database</i> kami ada. Di tahun ini, sampai hari ini ya, sudah ada 31 kasus anak yang dilaporkan dan kita tangani. Untuk tahun-tahun sebelumnya silakan bisa dicek di situs Dataku Kota Salatiga atau <i>website</i> DP3APPKB. Kemudian untuk data spesifik jenis kekerasannya apakah dipublikasi atau tidak? Tidak ya Mbak, hanya untuk internal kami, itu pun hanya pihak yang memang terlibat dalam tim penanganan, tidak selalu semua staf Dinas tahu. Kenapa demikian? Karena data itu termasuk data yang sensitif, dan menurut kode etik kami, itu tidak boleh disebarluaskan ke pihak lain atau pun <i>publish</i> di sebuah situs. Dalam setiap penanganan pun kami juga punya <i>inform consent</i> atau lembar persetujuan. Dimana salah satu kalimat dalam lembar tersebut menyatakan “prinsip kerahasiaan data,” yang mana memang dicari oleh korban, yaitu prinsip keamanan dan kenyamanan.</p>
<p>Dalam menangani ABH (anak berhadapan dengan hukum), langkah atau prosedur apa saja yang ditempuh oleh tim?</p>	<p>Jika berbicara tentang ABH, kami akan bekerjasama dengan beberapa instansi. Salah satu yang paling intens dan biasanya langsung kami hubungi adalah Polres Salatiga. Tapi tidak menutup kemungkinan kita bekerjasama dengan instansi lain seperti Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, dan Dinas Kesehatan. Kenapa? Umumnya ABH adalah mereka yang masih bersekolah, sedangkan secara umur mereka juga belum bisa dimasukkan sel, akhirnya kami butuh bantuan Dinas Sosial untuk menyiapkan panti rehab, bisa berupa panti asuhan atau yayasan swasta. Sedangkan untuk prosedurnya, ada dua jalan, (1) yang kami tangani adalah aduan kasus dari Polres atau (2) pelapor atau korban datang sendiri ke kami (DP3APPKB) untuk mendapat</p>

	<p>perlindungan. Jika ada limpahan kasus dari Polres, kami biasanya akan langsung datang dan berkoordinasi, kemudian melakukan pendampingan kepada anak. Tapi jika yang terjadi adalah jalan kedua, kami akan menerima laporan dan melakukan analisis awal terlebih dahulu. Yang kami butuhkan di awal saat laporan adalah data diri sebagai penunjang. Kemudian untuk domisili juga yang wajib kami tangani adalah mereka yang beralamat di Kota Salatiga. Tapi memang tidak menutup kemungkinan kami melayani mereka yang berasal dari wilayah sekitar Salatiga, misalnya warga Suruh (Kab. Semarang) datang dan melaporkan, maka akan kami layani dengan sistem bantu rujuk. Jika pun pelaku ada di Kab. Semarang tetapi korban di Kota Salatiga, maka pihak Kabupaten akan meminta bantuan kepada kami untuk melakukan pendampingan, misal visum dan pendampingan psikologis. Jadi jika berbicara tentang ABH yang memang masuknya ranah kepolisian, kami tidak lepas tangan, tetap membantu analisis awal dan pendampingan yang dibutuhkan anak. Istilahnya kami tidak terlalu mengekang anak, tidak membawa anak pada situasi yang menjatuhkan anak. Melainkan kita berperan untuk membangun kesadaran positif anak.</p>
<p>Dalam menangani ABH dan pelaksanaan klaster perlindungan khusus, sejatinya Dinas P3APPKB bekerjasama dengan pihak mana saja? Selain yang sudah disebutkan sebelumnya.</p>	<p>Selain pihak kepolisian, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, kami juga melakukan banyak kerjasama dengan pihak lain. Instansi yang saling bekerjasama ini tergabung dalam Tim P2TP2A. Misalnya ada dari Setda Bagian Hukum, berkaitan dengan peraturan dan segala pelaksanaan klaster perlindungan khusus. Kemudian ada RSUD untuk pemeriksaan visum. Nah</p>

	<p>bagaimana kami menentukan kerjasama? Biasanya bersumber dari analisis kasus di awal, kami akan petakan instansi A, B, C untuk bekerjasama menyelesaikan permasalahan ini. Tapi secara garis besarnya ada banyak instansi yang bekerjasama dengan Dinas P3APKB.</p>
<p>Jika yang diterangkan tadi lebih kepada instansi pemerintahan, apakah ada lembaga atau pihak swasta yang turut dalam penanganan kasus dan pelaksanaan klaster perlindungan khusus di Kota Salatiga?</p>	<p>Ada Mbak, kami ada kerjasama atau <i>MoU</i> dengan beberapa institusi di luar pemerintahan seperti UIN Salatiga dan UKSW. Sedangkan dengan dunia usaha kami juga ada kerjasama dengan PT. SCI, Unza Vitalis, dan Bank Jateng. Dan yang terbaru kami ada kerjasama dengan Yayasan Pesan sebagai penyedia rumah aman bagi anak-anak dalam proses penanganan.</p>
<p>Kemudian dalam jalannya kerjasama, bagaimana koordinasi dilakukan?</p>	<p>Koordinasi dengan instansi yang bermitra mulai kami lakukan setelah menerima laporan dan melakukan analisis awal. Oh dalam kasus ini kami petakan akan bekerjasama dengan instansi A, B, C. Setelahnya kami agendakan rapat internal, kami undang instansi yang terkait, dan kegiatan tersebut dilakukan secara langsung. Setelah rapat internal tim penanganan sebagai permulaan, kami lakukan rapat koordinasi sepanjang proses penanganan kasus. Jadi sembari kasus berjalan, kami juga melakukan pertemuan. Misal ketika rapat internal rencana kami adalah A, tapi di lapangan, langkah yang diambil bisa B atau C, jadi kami bahas di rapat koordinasi tersebut. Bagaimana baiknya, langkah apa yang harus diambil, begitu yang kami bahas di dalam rapat koordinasi. Itu kami sebut rapat untuk menentukan LTL, langkah tindak lanjut.</p>
<p>Selain penanganan kasus dan pelaksanaan program kegiatan, klaster perlindungan khusus juga berkaitan dengan penanggulangan bencana bagi</p>	<p>Jika dilihat masanya, BPBD sebagai instansi penanggulangan bencana di Kota Salatiga itu terhitung baru ada atau baru dibentuk. Jadi sampai saat ini</p>

<p>anak. Apakah dalam menyusun mekanisme penanggulangan bencana sudah melibatkan DP3APPKB dan memperhatikan hak-hak anak?</p>	<p>memang kami dilibatkan dalam rapat koordinasi dan pengusulan butir-butir penanggulangan bencana bagi anak, tapi memang teknisnya di lapangan saya kurang paham. Sejauh ini belum ada kegiatan dari BPBD maupun Dinas kami yang memang ditujukan kepada anak dalam bentuk kerjasama atau <i>MoU</i> yang pasti. Tapi yang kami tahu, di setiap titik yang berhubungan dengan anak, memang ada alat penanganan bencana, seperti APAR. Sebelum adanya BPBD, kami juga sudah memikirkan penanggulangan bencana, dimana kami bekerjasama dengan TAGANA (Taruna Siaga Bencana). TAGANA merupakan relawan sosial dari masyarakat yang sudah dibekali keahlian dalam penanganan bencana dan ada di bawah naungan Dinas Sosial. Sedangkan untuk hal-hal kemasyarakatan kami juga sudah ada kerjasama dengan Satpol PP.</p>
<p>Baik, terima kasih. Kembali pada indikator dalam klaster perlindungan khusus lainnya, yaitu anak dengan eksploitasi. Sepanjang 2019 hingga saat ini, adakah kasus eksploitasi dan pemekeraan anak yang dilaporkan ke Dinas P3APPKB?</p>	<p>Baik, eksploitasi itu diartikan sebagai anak yang dipekerjakan. Sampai saat ini, masalah-masalah anak didominasi oleh permasalahan ekonomi keluarga. Tapi untuk laporan dan penanganan eksploitasi belum ada. Jika mungkin ada, setelah dianalisis ternyata cenderung kepada penelantaran ekonomi, bukan anak yang dipekerjakan.</p>
<p>Beralih dari pertanyaan tentang indikator dalam klaster perlindungan khusus, dalam pelaksanaannya tentu melibatkan sumber daya atau tenaga, waktu, dan pembiayaan. Berkaitan dengan efisiensi, bagaimana alokasi waktu dalam setiap pelaksanaan kegiatan, khususnya dalam penanganan kasus?</p>	<p>Baik, jika bicara tentang efisiensi, tentu kami berusaha menempatkan sumber daya dan menggunakan waktu setepat mungkin. Jika untuk program kerja sosialisasi atau edukasi, kami adakan penanggung jawab setiap kegiatannya di dalam satu Bidang KPA. Umumnya alokasi waktu kegiatan dilakukan di satu hari kerja, tetapi jika kegiatan dengan satu tema dan bersifat per lokasi, maka bisa dilakukan berhari-hari. Tapi jika kaitannya dengan</p>

	<p>penanganan kasus, di awal akan kami perkirakan berapa kali hari kerja akan selesai. Misal satu kali mediasi selesai, maka waktunya mungkin hanya 2-3 hari. Dan itu sifatnya hanya estimasi sementara, tetapi setiap kasus tentu memiliki estimasi waktu penyelesaian yang berbeda-beda. Maka dari itu biasanya kami tidak terpaku pada estimasi tersebut. Misal dalam prosesnya, saat akan mediasi atau pengambilan tindakan, korban atau pelaku tidak bisa datang, sehingga kami akan menambah waktu. Tapi jika menurut SOP, laporan akan kami tangani maksimal 3x24 jam. Kami tidak bisa memaksakan suatu kasus selesai dalam sekian hari karena dalam setiap kasus analisis dan kondisinya berbeda-beda. Terlebih kami berhubungan dengan manusia yang sifat dan perilakunya dinamis. Misal hari ini bilang iya, besok saat dikonfirmasi bisa berubah jadi tidak, begitu.</p>
<p>Baik, dalam pelaksanaannya pun apakah pernah sumber daya atau tim penanganan kasus harus bekerja di luar jam operasional kantor?</p>	<p>Sering ya Mbak. Biasanya terjadi ketika ada kasus yang darurat. Dalam artian mereka yang harus segera mendapat perlindungan khusus. Misalnya pemberian rumah aman atau pendampingan proses visum.</p>
<p>Untuk jumlah tenaga atau sumber daya dalam penanganan kasus, adakah jumlah atau alokasi pastinya?</p>	<p>Kalau dari tim internal DP3APPKB kami ada beberapa orang yang pasti. Misal dari kesekretariatan untuk menerima aduan, dari Bidang KPA, dan Bidang PP. Tapi mengingat kegiatan Dinas selain penanganan yang cukup banyak, memang tidak menutup kemungkinan adanya tambahan dari Bidang lain yang memang mumpuni. Sedangkan untuk instansi luar DP3APPKB, kami tidak bisa memastikan jumlahnya, tapi biasanya 8-10 orang. Pada intinya pihak yang terlibat adalah mereka yang memang memiliki kecakapan. Karena menurut</p>

	<p>saya, tidak semua pegawai bisa menangani kasus dengan efektif. Kalau dengan baik, saya yakin semuanya mengusahakan yang terbaik, tapi kalau efektif belum tentu semuanya bisa. Terkait dengan apa? Terkait dengan bagaimana kami menenangkan klien, mengkomunikasikan kepada kedua pihak, seperti itu.</p>
<p>Lebih lanjut, bagaimana kualitas atau kemampuan sumber daya yang terlibat? Adakah kriteria dan keahlian tertentu?</p>	<p>Rata-rata tim kami, internal maupun pihak yang bekerjasama memang sudah dibekali dengan beberapa pelatihan dan sertifikasi. Misal seorang konselor, psikolog, sudah memiliki sertifikat KHA. Selain itu juga ada sertifikasi perlindungan anak, perlindungan perempuan, dan sebagainya.</p>
<p>Sedangkan untuk alokasi anggaran pelaksanaan klaster perlindungan khusus bagaimana?</p>	<p>Untuk ranah anggaran silakan langsung kepada atasan saya, Ibu Kabid KPA ya.</p>
<p>Dari pelaksanaan klaster perlindungan khusus, tim yang bertugas, hingga anggaran dan waktu yang sudah dialokasikan, perubahan apa saja yang sudah tercapai setelah Kota Salatiga mendapat predikat KLA tingkat madya di tahun 2019?</p>	<p>Sampai saat ini untuk klaster perlindungan khusus saya rasa sudah mengalami banyak peningkatan. Dimana klaster ini fokus pada penanganan anak yang berada dalam kasus, seperti ABH dan kekerasan. Dalam konteks pelaporan sudah terjadi peningkatan, artinya banyak yang melapor, berarti masyarakat banyak menyadari pentingnya pelaporan. Artinya program-program yang kami jalankan, visi dari klaster perlindungan khusus ini mengena di masyarakat. Kemudian adanya kerjasama dengan rumah aman, berarti upaya kita melindungi juga maksimal, tidak setengah-setengah. Dalam proses konseling atau penanganan kasus seperti mediasi pun kami juga memiliki komitmen dan menyediakan tempat yang nyaman bagi anak. Tempat tersebut ada di lantai atas, dimana kita bisa memberikan kenyamanan sehingga <i>output</i> dari proses pun baik untuk penanganan kasus, baik dari</p>

	<p>korban maupun kami yang menangani. Sedangkan berbicara tentang kerjasama, koordinasi yang terjalin juga jauh lebih baik dibanding 4-5 tahun lalu. Setiap instansi yang terlibat sekarang sudah memiliki kesadaran atau <i>awareness</i> akan hak anak. Hingga akhir klaster perlindungan khusus, yakni di saat penilaian atau evaluasi kebijakan, setiap instansi juga sudah menunjukkan komunikasi yang lebih terjalin. Tidak seperti dulu, justru saat penilaian menghilang dan kami yang harus bekerja ekstra.</p>
<p>Selain menyoroti perubahan positif, dalam keberjalanannya pun tentu tidak mudah. Apa saja keluhan kesah atau kesulitan dari tim dalam menjalankan klaster perlindungan khusus?</p>	<p>Baik, sejatinya kami adalah penyedia layanan publik dan masyarakat adalah pihak yang kami tuankan atau kami layani. Tapi karena kami berhubungan dengan manusia yang memiliki sifat dinamis, tentu semaksimal apapun kami memberi, bisa saja ada hal-hal yang kurang berkenan dari masyarakat. Tidak jarang pula masyarakat yang kurang paham sistem memaksakan kehendak mereka. Terlebih dalam menangani kasus, pelapor (masyarakat) tentu inginnya cepat. Sedangkan kami punya SOP atau kebijakan yang harus ditaati. Misal berkaitan dengan waktu pelayanan, kami berusaha memberi pemahaman tapi kadang hal itu <i>ndak kanggo</i> oleh masyarakat.</p>
<p>Untuk program dalam klaster perlindungan khusus apakah ada kesempatan bagi tim untuk menyusun program yang akan dijalankan dengan disesuaikan kebutuhan masyarakat?</p>	<p>Berkaitan dengan program kerja, itu disusun melalui Renja yang harus sesuai dengan Renstra dan RPJM. Tapi memang setiap tahunnya, yang diturunkan ke dalam Renja, kami melihat hal-hal yang terjadi di masyarakat, apa yang sebenarnya dibutuhkan dan kemudian kami susun dengan disesuaikan pada RPJM dan Renstra.</p>
<p>Bagaimana dengan publikasi informasi pelayanan pada klaster perlindungan</p>	<p>Sudah ya Mbak. Kami melakukan publikasi melalui media sosial DP3APPKB, seperti Instagram dan</p>

<p>khusus? Apakah sudah diketahui masyarakat?</p>	<p>pelayanan pelaporan kasus anak melalui WhatsApp. Kami juga menggunakan media <i>online</i> berupa <i>website</i>. Untuk media cetak kami ada di <i>leaflet</i> yang dibagikan ke masyarakat. Jadi sudah bisa dijangkau oleh masyarakat.</p>
<p>Apakah dalam penanganan kasus dan pelaksanaan program klaster perlindungan khusus terdapat kritik dari masyarakat? Apa saja bentuknya? Bagaimana Bidang KPA menanggapi kritik dan saran tersebut?</p>	<p>Beberapa kali memang ada kritik yang disampaikan kepada kami, tapi tidak banyak. Kritik biasanya disampaikan melalui WhatsApp atau saat mediasi tatap muka, seringnya tentang waktu pelayanan. Kami pun menanggapinya dengan positif, menerima dan menampung kemudian kritik tersebut kami jadikan acuan untuk membangun sistem lebih baik lagi. Respon kami kepada masyarakat tentu dengan bahasa yang baik, yang mudah dimengerti, karena maklum masyarakat adalah pihak yang ada di luar kami, jadi harus diberi pemahaman.</p>
<p>Sejauh ini bagaimana penilaian atau kepuasan publik terhadap pelayanan yang diberikan?</p>	<p>Terkait dengan puas atau tidaknya masyarakat terhadap program maupun pelayanan penanganan kasus dari kami, tidak bisa kami ambil sampel dari seluruh masyarakat, karena hanya yang menggunakan layanan lah yang tahu, dan tentu bersifat subjektif. Hanya saja pada Dinas kami sudah memiliki lembar kepuasan atau survey kepuasan setelah masyarakat menggunakan pelayanan atau mengikuti kegiatan dari kami. Sejauh ini, secara data <i>alhamdulillah</i> masyarakat merasa puas.</p>
<p>Apakah data tersebut dihimpun dalam suatu form atau <i>Excel</i> Bu?</p>	<p>Wah tidak ya Mbak, biasanya kami bagikan terus kami cek saja bagaimana penilaiannya, apakah puas atau tidak. Paling yang kami simpan penilaian penanganan kasus saja, karena kan termasuk kelengkapan dokumen untuk arsip.</p>
<p>Sebagai pelaksana teknis klaster perlindungan khusus, apakah menurut</p>	<p>Saya tidak bisa mengatakan baik banget, tapi menurut saya sebagai</p>

<p>Ibu tim pelaksana klaster perlindungan khusus sudah memberikan yang terbaik?</p>	<p>pelaksana teknis sudah lebih baik daripada sebelumnya. Dengan adanya kesadaran masyarakat yang melakukan pelaporan, koordinasi tim yang baik, kerjasama semakin beragam, adanya penyediaan fasilitas dan layanan ramah anak, kemudian banyak Dinas yang paham akan kebutuhan perlindungan khusus anak saya rasa sudah baik.</p>
<p>Jika demikian, bagaimana hasilnya terhadap pemenuhan hak anak dan penekanan jumlah kasus kekerasan anak di Kota Salatiga?</p>	<p>Jika berbicara tentang pemenuhan hak anak, saya rasa sudah terpenuhi. Bahkan sebelum saya bergabung ya, karena Kota Salatiga mendapat predikat KLA madya juga sudah dari 2019 yang mana menandakan jika hak anak sebetulnya sudah atau mulai terpenuhi. Jika berkaitan dengan penekanan angka kekerasan, kami agak bingung ya menyampaikannya. Memang secara normatif hal buruk harus dikurangi, jadi jika datanya rendah idealnya baik. Tapi jika pada kasus kekerasan, indikator yang kami pakai adalah bagaimana masyarakat banyak melapor. Jadi jika di kami, bagaimana menunjukkan menekan kasus kekerasan, ya kami lihat dari banyaknya yang melapor. Dan hal tersebut sudah tercapai di Kota Salatiga dari tahun ke tahun. Otomatis dari poin banyaknya laporan itu, kami bisa menegaskan jika program kami tersampaikan ke masyarakat, dan kami berhasil menekan kasus kekerasan di Kota Salatiga.</p>
<p>Baik Ibu terima kasih atas berbagai informasi yang sudah disampaikan berkaitan dengan topik tugas akhir saya. Saya sangat terbantu dengan situasi wawancara yang kooperatif ini. Semoga Ibu selalu diberi kesehatan dan kelancaran dalam bekerja.</p>	<p>Iya sama-sama Mbak, semoga yang saya sampaikan membantu ya. Jika besok dibutuhkan data atau informasi lainnya silakan berkunjung kembali.</p>

C. Narasumber 3

Nama : Prima Riani
 Jabatan : Sekretaris Yayasan Pesan
 Waktu : Senin, 27 November 2023, Pukul 09.00 WIB
 Tempat : Kantor Yayasan Pesan Kota Salatiga

Pertanyaan	Jawaban
<p>Selamat pagi Ibu. Terima kasih sudah meluangkan waktunya dan bersedia menjadi narasumber dalam penelitian Tugas Akhir saya. Perkenalkan saya Alfina Oktaviani, mahasiswa semester akhir Ilmu Pemerintahan UNDIP. Yayasan Pesan sebagai mitra kerjasama Dinas P3APPKB Kota Salatiga saya pilih sebagai salah satu subjek penelitian, dengan harapan dapat melengkapi data penelitian terkait evaluasi penyelenggaraan kebijakan Kota Layak Anak khususnya pada klaster perlindungan khusus. Apakah Ibu bersedia menjawab pertanyaan-pertanyaan saya?</p>	<p>Selamat pagi Mbak Alfina. Terima kasih sudah memilih kami dan datang kesini. Tentu saya bersedia, silakan dimulai.</p>
<p>Untuk memulai wawancara ini, silakan Ibu memperkenalkan diri terlebih dahulu, meliputi nama, pekerjaan atau tanggung jawab di Yayasan, dan lama bekerja.</p>	<p>Perkenalkan nama saya Prima Riyani, panggil saja Mbak Prima. Di Yayasan Pesan saya diberi kepercayaan sebagai Sekretaris Yayasan. Saya sudah bekerja disini sejak tahun 2017.</p>
<p>Baik, terima kasih atas perkenalannya. Kalau begitu saya akan melanjutkan wawancara dengan memanggil Mbak, begitu ya. Sebelum masuk ke pertanyaan inti, saya mohon bantuan Mbak Prima untuk bisa menceritakan atau memperkenalkan perkembangan dari Yayasan Pesan terlebih dahulu.</p>	<p>Jadi awal mulanya kami tidak langsung menjadi Yayasan Pesan. Awalnya kami bernama PEARL (Pencegahan Eksploitasi Anak dan Rehabilitasi Lingkup Kehidupan). Fokusnya yaitu ke anak dan perempuan. Kami juga sempat punya <i>safe house</i>, tapi karena dibuat "prematur," kami tidak punya mitra atau jaringan yang banyak dan tidak begitu memahami bagaimana cara kerjanya. Akhirnya <i>safe house</i> di masa PEARL tidak berlanjut dan fokus kami berlanjut pada pencegahan dan edukasi tentang eksploitasi.</p> <p>Lalu karena izin kami (PEARL) adalah perkumpulan, kami kurang bisa memperluas jangkauan dan kerjasama</p>

	<p>dengan instansi maupun lembaga di Salatiga. Kami tidak bisa bekerjasama dengan Dinas, Perusahaan, dan sebagainya. Pada saat itu, walau hati kami sudah penuh tapi perizinan belum lengkap, maka dimanapun kami menawarkan diri seringkali ditolak. Terutama pemerintah akan menanyakan “kamu itu siapa?” Akhirnya pada tahun 2018 kami melengkapi perizinan dan mendirikan suatu yayasan, yaitu Yayasan Pesan ini. Dengan terbentuknya Yayasan ini, makin banyak mitra dan kami memiliki kesempatan belajar banyak hal dari mereka, akhirnya kami mendapat peluang dan didirikanlah kembali <i>safe house</i>.</p> <p>Lebih lanjut, di dalam Yayasan Pesan terdapat dua divisi yaitu (1) PEARL yang bergerak di ranah pencegahan dan (2) <i>New Beginning</i> sebagai bentuk <i>after care</i>. Jadi di dalam <i>New Beginning</i> ini lah <i>safe house</i> dan pelayanan <i>after care</i> ada. Pada kedua divisi tersebut kami selalu melakukan pemberdayaan, baik edukasi maupun praktik seperti membuat kerajinan tangan. Harapannya agar mereka yang ada di dalam Yayasan Pesan memiliki kemampuan menghasilkan sesuatu yang bernilai ekonomi. Jika Mbak lihat, di belakang adalah sebagian Ibu-Ibu yang kami bina. Mereka adalah orang-orang yang rentan menjadi korban kekerasan. Itu juga termasuk bagian pencegahan ya, kami tidak hanya mengurus para penyintas atau korban tetapi juga menanggulangi. Demikianlah historis singkat dari kami. Memang sudah sejak lama berdiri, tapi untuk mencapai perizinan birokrasi baru di tahun 2018.</p>
Baik, ternyata perjalanannya panjang dan cukup membutuhkan waktu ya	Tentu Mbak. Awalnya <i>New Beginning</i> fokus pada rehabilitasi anak di bawah umur, kemudian rehabilitasi pada siapa

<p>Mbak. Untuk <i>New Beginning</i>, apakah bisa dijelaskan keberjalanannya?</p>	<p>pun (tidak ada batasan usia, dewasa pun kami layani), tetapi sekarang memang fokus kami kembali pada anak-anak dan perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual maupun eksploitasi.</p>
<p>Baik, cukup jelas, terima kasih Mbak. Selanjutnya kita akan masuk ke pertanyaan sesuai dengan topik penelitian ya Mbak. Sejak kapan Yayasan Pesan atau lebih tepatnya Divisi <i>New Beginning</i> mulai bermitra dengan Dinas P3APPKB Kota Salatiga?</p>	<p>Sebenarnya sudah lama. Sejak awal <i>New Beginning</i> ada, kami sudah menjalin kerjasama dengan Dinas terkait. Tapi memang secara intensitas masih rendah. Tapi kami pikir intensifnya pada dua tahun terakhir ini ya. Mengingat Kota Salatiga juga baru gencar peduli perlindungan anak dan perempuan akhir-akhir ini.</p>
<p>Baik, dari bentuk kerjasama tersebut, kasus apa saja yang ditangani bersama-sama antara Dinas P3APPKB dengan Yayasan Pesan?</p>	<p>Secara umum kasus yang kami kerjakan dengan Dinas P3APPKB adalah kekerasan anak dan perempuan, baik fisik maupun seksual.</p>
<p>Oh iya Mbak. Perihal kekerasan pada anak, memang di Kota Salatiga didominasi oleh dua kasus tersebut ya? Kemudian apabila diperkenankan, mohon untuk diberikan gambaran kasusnya ya Mbak.</p>	<p>Iya, betul. Apa lagi satu tahun terakhir ini. Rata-rata kasus kekerasan itu berupa kekerasan seksual yang bisa saja meninggalkan luka fisik dan psikis ya. Berbicara soal kasus kekerasan mohon maaf saya tidak bisa menceritakan secara jelas ya Mbak, tapi bisa saya sampaikan salah satu kasus pada tahun ini ya. Kami mendapat kasus kekerasan seksual pada seorang anak perempuan yang mana pelakunya adalah pacar dari neneknya. Ada juga kasus kekerasan seksual yang pelakunya ayah tiri. Begitu Mbak.</p>
<p>Kemudian apakah Yayasan Pesan pernah menerima penanganan kasus yang mana korban adalah anak dan ibu, misal diakibatkan oleh KDRT atau permasalahan dalam suatu rumah?</p>	<p>Sejauh ini kami belum pernah menangani dua korban sekaligus dari satu kasus, terlebih dari dalam satu rumah begitu ya Mbak. Karena yang kami takutkan, akan ada bias antara keterangan dari dua korban dan akan berpengaruh pada penanganan maupun analisis tim penanganan kedepannya, begitu.</p>
<p>Baik Mbak. Kemudian dalam menerima kasus, untuk menghindari bias yang dimaksud (antara korban dan</p>	<p>Kami sifatnya terbuka ya, kami ingin suatu kasus yang ditangani jelas seluk beluknya, sehingga kedepannya</p>

<p>keluarga), apa saja yang dilakukan Yayasan?</p>	<p>langkah yang kami ambil benar dan tidak ada kesalahan <i>treatment</i>. Biasanya kami akan menerima kasus setelah melakukan wawancara dengan keluarga, dengan pelapor, bertanya pada anak apakah anak bersedia untuk tinggal bersama kami (Yayasan). Karena pernah terjadi di awal kami berdiri, ternyata anak mengalami tekanan dari Ibu untuk kemudian digunakan sebagai media mengeruk uang dari ayahnya. Secara tidak langsung anak dimanfaatkan oleh ibunya. Dan saat kami tahu faktanya, tentu sulit memutuskan bagaimana penanganan berikutnya.</p>
<p>Oh iya Mbak, jika berkaitan dengan kerjasama, apakah Yayasan Pesan pernah melakukan pengenalan pelayanan ke instansi pemerintahan di Kota Salatiga? Terlebih selain Dinas P3APKB.</p>	<p>Tentu pernah Mbak, terlebih kami menyadari sebagai pihak swasta harus pro aktif ke pemerintah. Istilahnya kami datang dan memperkenalkan diri saja masih tidak digubris, apalagi tidak memperkenalkan diri dan rajin <i>sowan</i> ya Mbak. Pernah di tahun 2018/ 2019 yang lalu kami datang ke Dinas Sosial, memperkenalkan Yayasan, termasuk layanan pendampingan terhadap orang yang menjadi korban perdagangan manusia di Kota Salatiga. Pada saat itu mereka (Dinas Sosial) justru kaget ditemukan kasus yang demikian di Kota Salatiga. Karena selama ini mereka mengakui di Salatiga tidak ada kasus TPPO, kasusnya nol.</p>
<p>Menurut Mbak Prima mengapa hal demikian bisa terjadi ya? Ketika Dinas yang seharusnya ikut dalam penanganan kasus semacam itu, justru tidak mengetahui sudah terjadi atau ada korbannya.</p>	<p>Saya tidak bisa memastikan, apakah Dinas sebagai instansi pemerintahan ingin seutuhnya terlihat baik dan menulis laporan dengan <i>zero case</i>, atau bisa juga pada tahun-tahun tersebut masyarakat masih tidak memiliki akses informasi pelaporan dan Dinas terkait pun tidak bekerja di lapangan semaksimal saat ini. Salah satu contohnya begini Mbak, pelaporan kasus HIV di Kota Salatiga pada beberapa tahun lalu ada di angka 1000. Tapi semakin tahun orang memiliki</p>

	<p>kesadaran akan penyakit tersebut, di tahun-tahun berikutnya data menjadi 2000 kasus dan seterusnya, jika begitu apa bisa dikatakan pendidikan kesehatan itu tidak efektif? Tidak bisa diartikan demikian ya. Kenapa 2000 kasus terlapor? Tandanya sudah lebih banyak orang yang sadar, oh ternyata aku seperti ini ya, oh dia punya gejala ya, dan sebagainya.</p> <p>Tapi saya akui, sebagai pihak di luar pemerintah, saya rasa kebijakan dan bentuk-bentuk kegiatan yang bersifat edukatif belum sepenuhnya menjangkau masyarakat. Kami pun sebagai Yayasan yang sudah berlisensi juga terkadang masih sulit untuk ikut dalam kegiatan pemerintah. Niat kami sudah ada, sudah penuh untuk mengedukasi, tapi sering terhalang.</p>
<p>Baik Mbak, yang saya tangkap adalah di tingkat masyarakat, kesadaran dan pendidikan akan isu-isu vital belum terbangun dengan baik ya. Dan saya rasa gambaran tersebut dapat dilihat pula dalam pelaporan kasus kekerasan terhadap anak.</p>	<p>Iya betul, kalau kita ibaratkan seperti fenomena gunung es ya Mbak. Tapi melihat <i>traffic</i> pelaporan kekerasan anak di Kota Salatiga akhir-akhir ini saya sudah cukup puas. Ada kenaikan, berarti kesadaran masyarakat mulai terbangun.</p>
<p>Kembali pada kerjasama antara Yayasan Pesan dan Dinas P3APPKB, bagaimana prosedur atau mekanisme yang diajukan oleh Yayasan kepada Dinas P3APPKB?</p>	<p>Baik, dalam <i>MoU</i> kami adalah pihak pertama ya Mbak. Mengapa demikian? Kami berdiri di luar sisi pemerintahan, tentu kami memiliki aturan yang juga harus dipenuhi oleh Dinas P3APPKB yang istilahnya meminta bantuan. Pada dasarnya sebagai pihak swasta yang mengutamakan kualitas atau pelayanan, bukan kuantitas, ketika menerima kasus adalah berusaha memotong regulasi atau urusan birokrasi yang mungkin untuk dilewatkan. Karena fokus kami adalah kepada penanganan anak, kalau kami harus ini dulu A B C, kadang kan menghambat tindakan atau jalannya penanganan ya. Jadi untuk prosedur, sederhananya begini (1) Dinas P3APPKB menghubungi kami; (2)</p>

	<p>laporan diterima, kami bersedia, lanjut adakan rapat koordinasi awal; (3) saat serah terima anak, data diri yang dibutuhkan harus lengkap dan tidak ada yang tercecer; (4) anak dalam masa rehabilitasi di <i>safe house</i>, ada monitoring dengan Dinas, dan kunjungan berkala.</p>
<p>Biasanya dokumen atau regulasi birokrasi apa yang bisa dipotong atau dilewatkan terlebih dahulu Mbak?</p>	<p>Misalnya di Yayasan kami ada peraturan apabila ada pelaporan kasus kekerasan anak atau kerjasama semacamnya, pihak pemohon bantuan pertama harus menemui koordinator <i>New Beginning</i>. Nah apabila saat Dinas P3APPKB menghubungi kami tetapi koordinator divisi tidak ada di tempat, maka bisa menemui siapa pun yang berjaga di kantor, misal saya sekretaris, atau koordinator PEARL untuk segera membuat laporan awal dan penggambaran bentuk kerjasama.</p> <p>Kemudian kalau dari pihak Dinasnya ya, instansi pemerintah itu kan terkenal membutuhkan waktu ya dalam setiap pelayanannya, jadi kalau pun kami harus menunggu sampai dokumen birokrasi mereka terlengkapi, maka kami akan bantu dengan hal-hal yang bisa sembari kita kerjakan. Misalnya melakukan wawancara dengan anak dan keluarga atau pelapor tentang kesepakatan tinggal di <i>safe house</i>. Karena dari awal sudah kami tekankan ya Mbak, yang utama di Yayasan kami adalah kualitas, bukan kuantitas kasus yang kami tangani. Kami ingin maksimal dan fokus pada setiap kasusnya, jadi anak pun sudah ada kenyamanan dan kesepakatan sejak awal.</p> <p>Pernah di kasus yang terakhir dilimpahkan ke kami, pada pertengahan tahun, dari Dinas P3APPKB setelah menghubungi kami inginnya sudah langsung saja dibawa ke <i>safe house</i>. Tentu kami menolak,</p>

	<p>karena yang pertama selain perkara berkas, kami juga harus tahu anak ini mau atau tidak, tidak bisa langsung dipindahkan begitu. Di luar kesepakatan tertulis pun kami selalu menyampaikan kepada Dinas, kami akan menolong ketika anak juga mau dan ingin bersama kami. Jadi bukan seenaknya seperti memindahkan kucing dalam karung ya. Kebetulan kasus yang terakhir kemarin seperti itu Mbak.</p>
<p>Baik Mbak, berkaitan dengan serah terima atau pengantaran, pertemuan kerjasama, dan sebagainya apakah dilakukan di kantor ini?</p>	<p>Iya Mbak betul, kami mengibaratkan kantor ini sebagai titik aman kami. Dari Dinas mengantar anak dan menandatangani <i>MoU</i> disini, orang tua menyerahkan anak disini, mau ada pertemuan juga disini, begitu. Tidak semua orang bisa tahu dimana letak <i>safe house</i>. Biasanya pun dalam penanganan suatu kasus kerjasama, akan ada beberapa pos tim, dari administrasi, dengan orang tua atau pelapor, dan dengan anak. Sebagai bentuk kepastian dari anak pun, kami selalu menandatangani <i>MoU</i> tersebut dengan tanda tangan dari anak juga.</p>
<p>Baik Mbak, di dalam <i>MoU</i> apakah juga ada kepastian anggaran dengan Dinas P3APPKB?</p>	<p>Iya Mbak betul, kami sebagai pihak yang bermitra, terlebih swasta tentu sangat mengutamakan transparansi keuangan ya. Ketika menerima kasus di awal, kami akan melakukan analisis awal termasuk analisis anggaran. Sehingga bila di tengah-tengah rehabilitasi pihak Dinas mengatakan maaf Mbak anggaran kami untuk anak A sudah habis, apa kita pulangkan saja, dan sebagainya itu tidak bisa ya. Karena di awal kan sudah ada kesepakatan bermeterai. Tapi memang hal tersebut pernah terjadi di awal Yayasan Pesan berdiri. Ya kami maklum namanya berurusan dengan pemerintah, bisa ya hal seperti itu terjadi.</p>

<p>Oh iya Mbak, berkaitan dengan pembiayaan, bentuk pendampingan atau rehabilitasi yang ada di Yayasan Pesan ini seperti apa ya?</p>	<p>Iya karena pembiayaan yang bersifat pasti dan sudah atas persetujuan awal, kami tidak bisa ya melepas anak begitu saja. Misal pada kasus di awal Yayasan Pesan bermitra dengan Dinas, setelah dua tahun pendampingan Dinas menyatakan dana sudah habis dan meminta kami melepas anak, tentu kami tolak dan kami carakan anggaran lain. Mengapa demikian? Karena pendampingan kami bersifat holistik atau global. Tidak hanya psikologis, visum, pengobatan fisik, kami juga berusaha memastikan anak hidup dalam kecukupan, terpenuhi segala haknya, termasuk pengembangan keilmuan, keterampilan, bahkan kebutuhan hiburan kami berusaha memenuhi. Sehingga anak menjadi tahu bagaimana konsep kehidupan seorang anak semestinya.</p>
<p>Baik Mbak, sudah cukup jelas untuk prosedur kerjasama. Berikutnya berkaitan dengan kontribusi Yayasan, sejauh ini wujud kontribusi Yayasan Pesan terhadap penekanan angka kekerasan anak dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang perlindungan anak di Kota Salatiga apa saja? Selain bermitra dengan Dinas atau instansi pemerintah.</p>	<p>Berbicara tentang kontribusi bagi Kota Salatiga sebenarnya kami merasa masih di angka yang kecil atau sebenarnya di bawah kemampuan maksimal yang kami punya. Kemudian dalam pencatatan dan publikasi pencapaian kami memang masih minim. Tapi beberapa hal yang sudah kami lakukan sepanjang berdiri, (1) Divisi Edukasi sering terjun ke lapangan, melakukan pendidikan pencegahan pelecehan dan perdagangan manusia ke masyarakat misal di pertemuan RW dan PKK di lingkungan Kota Salatiga. (2) Melakukan pendampingan bagi perempuan yang rawan menjadi korban kekerasan, misal dengan pelatihan kerajinan tangan dengan tujuan mereka bisa memiliki kemampuan menghasilkan uang dengan nilai barang yang lain. (3) Tahun depan kami berencana mendampingi kelompok baru, mereka yang disini akan lulus dan diganti oleh angkatan</p>

berikutnya. Selain pendampingan keterampilan kami juga memberi edukasi tentang eksploitasi, ketenagakerjaan, kekerasan, dan sebagainya. Dan kami pun tidak berhenti disitu, tapi juga memastikan mereka (para perempuan) juga mengajarkan kepada anak-anaknya. (4) *Workshop* dasar baik tatap muka maupun *online* sejak awal PEARL terbentuk. Beberapa kali kami juga diundang ke Pemkot untuk mengisi kegiatan dengan topik perempuan dan anak. Kebetulan saya pribadi juga seorang Fasilitator Anti TPPO di bawah Kementerian PPPA. (5) Di Yayasan juga terdapat Divisi *Youth & Child*, kami sudah ada kerjasama dengan salah satu SMP di Kota Salatiga, jumlah murid di SMP tersebut kurang dari 50 anak dan bentuk kerjasamanya adalah pendampingan. Kami setiap minggunya punya dua kali pertemuan, satu pertemuan untuk aktivitas KBM atau di kelas dan satu pertemuan untuk kegiatan di luar kelas. Di setiap satu pertemuannya kami diberi waktu 1-1,5 jam. Materi yang kami ajarkan disebut oleh pihak sekolah sebagai pendidikan karakter, jadi tujuan kami membentuk pribadi yang resilien. Bahkan dalam kegiatan luar kelas tersebut kami juga diizinkan mendampingi keluarga mereka, misal dalam hal *parenting*, pemahaman emosi anak, dan sebagainya. Di luar keluarga, mereka juga sering mengajak kami Mbak Mas ayo keluar, ngopi yuk, ngobrol yuk. Di tengah obrolan atau main tersebut kami akan mendengar mereka, apa yang mereka ingin tahu atau ingin pelajari. Akhirnya kami pun memposisikan diri seperti teman, seperti kakak. Kira-kira sedalam itulah keseriusan kami dalam mendampingi anak. Selain suatu sekolah ini kami

	<p>juga ada keberhasilan lain, kami pernah menangani beberapa anak yang sudah kehilangan semangat sekolah akhirnya bisa termotivasi dan bersekolah kembali.</p> <p>Jadi sebenarnya kami merasa punya banyak sumber daya yang ingin dibagikan tapi kami akui kami kurang akses keluar dan untuk dikenal di lingkup Kota Salatiga. Karena jika di regional Jawa dan nasional kami sudah memiliki <i>link</i> antar yayasan swasta, sehingga sering terlibat dalam beragam kegiatan anti TPPO, anti kekerasan anak dan perempuan. Setiap dua tahun sekali kami juga adakan pelatihan untuk para pendamping atau fasilitator se-Indonesia. Kami beri pemahaman sebelum kamu menyembuhkan orang lain, kamu harus dalam kondisi yang sehat terlebih dahulu. Jangan sampai untuk menyembuhkan seseorang kamu menyakiti diri sendiri atau orang lain, begitu. Tapi kurikulum yang demikian memang belum pernah kami adakan di Kota Salatiga dengan skala besar seperti <i>ToT</i>.</p> <p>Sekali lagi saya tekankan, kontribusi kami bagi Kota Salatiga dalam penekanan angka kekerasan memang tidak bisa diukur dari kuantitas, tetapi lebih berorientasi pada kualitas. Kemudian kami juga sering menekankan ke sesama pengurus Yayasan, untuk di Salatiga mari kita mulai dari lingkup terkecil, keluarga, masyarakat sekitar, dan seterusnya. Kemudian jika ke cakupan yang lebih luas kami juga melakukan pendekatan ke gereja, masjid, maupun fasilitas publik lain yang sekiranya bisa menjadi pihak yang peduli anti kekerasan anak dan perempuan sehingga bisa memberi dampak bagi sekitarnya.</p>
Selain berbagai kegiatan dan kontribusi tersebut, perubahan positif yang	Iya Mbak, ini salah satu pencapaian yang belum saya sebutkan juga tadi.

<p>spesifik terjadi di Kota Salatiga sebagai pengaruh adanya Yayasan Pesan apakah bisa disampaikan Mbak?</p>	<p>Berkaitan dengan perdagangan manusia, termasuk perempuan dan anak, mereka yang rentan cenderung terjadi pada orang-orang yang tidak memiliki kelengkapan identitas penduduk. Misalnya pada anak-anak, tidak didaftarkan akta kelahiran, tidak ada namanya di KK (bahkan orang tuanya tidak memperbarui KK), termasuk KIA yang belakangan ini penting untuk anak.</p> <p>Nah mengatasi hal yang demikian, yang kebetulan beberapa terjadi di anak yang kami tangani di <i>safe house</i> juga, kami mengusahakan pengadaan identitas mereka. Kami uruskan di Disdukcapil. Kemudian untuk keluarga yang semula tidak punya dokumen kependudukan kami juga bantu Mbak. Misal nama anaknya belum terdaftar di KK atau bahkan terdaftarnya di KK misal neneknya, itu kami uruskan. Tujuannya apa? Ya kami menanggulangi hal-hal semakin buruk terjadi, khususnya yang merujuk pada TPPO dan tindak kekerasan.</p> <p>Melanjutkan tentang pemberdayaan kepada perempuan, seperti Ibu-Ibu yang kami bina di belakang itu, kami beri pelatihan keterampilan dan juga pengembangan diri atau <i>soft skill</i>. Mereka yang berasal dari kalangan rentan di awal pun sempat ketakutan memakai jarum, ada rasa trauma bahkan dari melihat jarum, tidak berani menatap orang, merasa tidak enak jika diperlakukan dengan baik. Tapi sekarang mereka sudah terbiasa, sudah bisa. Bahkan kami juga sering memberi mereka bantuan berupa tambahan uang yang seringkali dari mereka mengatakan uang yang kami berikan di luar dari ekspektasi atau bayangan mereka.</p> <p>Selain menjangkau anak dan Ibu-Ibu di sekitar, kami juga sering</p>
--	--

	<p>memberikan bantuan kepada perempuan di kawasan Sembir. Bantuan tersebut kami mulai saat pandemi, saat itu pekerja di sana tidak bisa keluar karena adanya larangan dari pengelola, akhirnya kebutuhan dasar perempuan kami penuhi, mulai dari pembalut, vitamin, makanan. Itu lah suatu perubahan positif yang saya rasa seharusnya berarti bagi pemerintah Kota Salatiga. Karena kami menyentuh masyarakat langsung, bukan hanya ikut dalam acara-acara pemerintah yang belum tentu bisa berdampak bagi masyarakat.</p> <p>Terus juga saat ada mahasiswa magang misalnya, kami tidak hanya memberi mereka pekerjaan yang sifatnya administratif, tapi kami juga mengajak mereka untuk terjun ke masyarakat. Misalnya ikut dalam langkah edukasi kepada perkumpulan PKK, kemudian mahasiswa mempraktikkan ilmu yang mereka punya. Misal ada mahasiswa psikologi, teologi, keperawatan begitu ya. Dari pelibatan mereka dalam aksi kita pun kami juga merasa bisa membuat mereka belajar di luar disiplin ilmunya, jadi tidak linear saja ya. Kesimpulannya perubahan positif yang kami capai tidak hanya pada anak yang kami tangani, tapi juga kepada masyarakat dan mereka yang memang ingin belajar dan memiliki pemahaman terhadap gerakan anti kekerasan anak dan perempuan.</p>
<p>Ternyata sudah banyak ya Mbak pengaruh positifnya bagi Kota Salatiga, walau secara kuantitas Mbak Prima menyampaikan belum maksimal. Kemudian Mbak, jika dalam hal kerjasama dengan Dinas P3APPKB, apakah Yayasan Pesan memiliki hak intervensi atas kasus yang ditangani bersama?</p>	<p>Tentu Mbak, kami punya hak yang tertulis dan sudah disepakati bersama, antara Dinas P3APPKB, pelapor atau keluarga, bahkan anak yang akan kami dampingi. Sehingga batasan setiap pihak yang terlibat itu jelas ya. Dan batasan tersebut juga menghantarkan kita pada rasa saling percaya dalam kerjasama ya. Sejauh ini pun kami telah</p>

	<p>bekerjasama dengan sehat. Yayasan tahu batasnya dimana, Dinas punya batasan yang tidak bisa kami lawan, dan begitu pula keluarga atau pelapor dan anak yang kami dampingi.</p> <p>Misalnya dalam penanganan suatu kasus dan sudah waktunya pihak Dinas melakukan kunjungan berkala kepada anak di <i>safe house</i>, maka tidak semua orang di Dinas terkait bisa tahu alamat <i>safe house</i> kami. Begitu pula dengan pekerja di Yayasan kami, mereka yang tidak terlibat dalam penanganan maka tidak akan tahu dimana alamatnya. Karena hal tersebut termasuk data sensitif dan tidak bisa disebarluaskan kepada pihak yang tidak berkepentingan.</p> <p>Pada saat kunjungan atau pengantaran anak pun, siapa saja yang akan masuk ke <i>safe house</i> termasuk pejabat pemerintahan atau pengurus Yayasan sudah kami beri tahu peraturannya, misal ada pengecekan tas, alat komunikasi dikumpulkan di pintu depan, kalau memberi hadiah bagi anak aturannya satu diberi maka semua harus mendapat. Demi kenyamanan dan keamanan bersama aturan sedetail itu kami buat dan harus dipatuhi siapa saja. Mengingat setelah anak diserahkan, 100% mereka adalah tanggung jawab kami.</p>
<p>Baik Mbak, berkaitan dengan kerjasama dengan Dinas P3APPKB dalam perlindungan anak, apakah ada keluhan atau hambatan yang berarti bagi Yayasan?</p>	<p>Manusia sebagai pekerja itu kan berkembang ya Mbak, misal kemarin melakukan kesalahan A oh besok sudah tahu sehingga tidak diulangi. Tapi satu hal yang kami <i>highlight</i> dan sering terulang sampai saat ini jika berurusan dengan pemerintahan adalah kedisiplinan waktu dan tanggung jawab. Misal kami diundang untuk rapat koordinasi di Dinas P3APPKB pada jam yang sudah disepakati, paginya saat kami datang tiba-tiba pihak yang mengundang tidak ada di</p>

	<p>kantor. Bahkan bulan lalu saat akan rapat koordinasi, ada di satu momen saya sudah membatalkan janji lain untuk datang tetapi pihak yang mengundang justru sedang cuti dan tidak melimpahkan atau memberitahukan agendanya ke rekan kerja yang satu Bidang. Jadi kami sering dibingungkan dengan kondisi yang demikian.</p> <p>Kemudian berkaitan dengan otoritas, pemerintah itu kan sangat birokratis dan terstruktur. Jadi saat ada kendala tidak bisa pihak dari Dinas mengambil keputusan sepihak, tapi dia harus melakukan diskusi tim, melapor ke atasan, baru mendapat keputusan. Berbeda dengan kami di ranah swasta, setiap divisi atau penanggung jawab dibekali dengan otoritas yang memungkinkan kami bergerak lebih fleksibel dengan syarat keputusan yang kami ambil memang sesuai ranah dan tidak mengganggu jalannya divisi lain. Tapi hal demikian juga kami sadari sebagai suatu perbedaan ranah instansi yang harus dimaklumi ya.</p>
<p>Baik, jika dalam hal kerjasama dengan instansi terkait ada keluhan atau beberapa kendala. Jika berbicara tentang anak yang ditangani, apakah ada kesulitan dari Yayasan?</p>	<p>Baik Mbak, berbicara tentang korban atau anak yang singgah di <i>safe house</i> kami tidak bisa menyampaikan terlalu dalam, karena sudah berkaitan dengan privasi dan kode etik yang kami tetapkan. Tapi ya hal-hal yang banyak kami alami di awal adalah anak yang secara tata krama dan sopan santun kurang, cara berpakaian kurang layak, begitu ya Mbak. Tapi kami sebagai Yayasan dengan fokus anak dan perempuan tentu bisa memahami kondisi setiap anak dan memang disinilah mereka mendapat pendidikan dan pengetahuan yang seharusnya dipraktikkan, bagaimana baiknya, bagaimana mestinya begitu.</p>
<p>Baik Mbak, jika berbicara tentang tanggapan masyarakat khususnya para</p>	<p>Sejauh ini respon atau tanggapan dari orang tua, pelapor, maupun masyarakat</p>

<p>penerima layanan dari Yayasan Pesan, misal pelapor atau orang tua anak, bagaimana ya Mbak? Apakah ada kritik atau ketidakpuasan dari mereka?</p>	<p>sekitar baik ya Mbak, mereka puas. Meskipun saya tidak <i>contact</i> langsung dengan orang tua atau pelapor anak-anak disini, dari tim sering mengatakan tanggapan mereka positif dan tidak ada komplain ya. Bagi saya kerjasama dengan instansi pemerintahan juga baik untuk kami, apa lagi kami sudah berdiri cukup lama dan ingin menjalin kerjasama. Saya kira hal seperti ini akan meningkatkan kepercayaan kita ke pemerintah juga, karena ada bukti oh ternyata lembaga swasta juga bisa kok terlibat dalam urusan pemerintah, bisa membantu kok.</p>
<p>Tentu ya Mbak, saya pun yang baru tahu informasi penting seperti di awal merasa Yayasan sudah bekerja dengan baik. Tapi apakah bisa dispesifikkan, tanggapan baik atau positif tersebut bentuknya seperti apa?</p>	<p>Mereka senang Mbak. Mereka merasa puas dan terlindungi karena anaknya berada di tempat yang aman, tempat yang memberikan keperluan, hak, maupun kehidupan yang semestinya dijalani anak. Ada teman bermain, ada seseorang yang berperan layaknya kakak atau ibu. Seperti yang saya sampaikan di awal ya, karena kami memiliki prinsip pendampingan holistik atau global dan menjamin kehidupan anak di <i>safe house</i> sebagaimana mestinya anak bertumbuh kembang.</p>
<p>Baik Mbak. Kemudian sebagai bentuk transparansi dan tanggung jawab kerjasama antara Yayasan Pesan dan Dinas P3APPKB adakah rapat berkala atau rapat koordinasi?</p>	<p>Iya Mbak, berkaitan <i>trust</i> dan transparansi dalam kerjasama tentu kami ada ya rapat semacam itu. Tapi memang kasus yang diserahkan atau yang dikerjakan bersama antara Yayasan dengan Dinas P3APPKB dua tahun terakhir ini belum ada yang statusnya selesai ya Mbak. Anak-anak masih ada di <i>safe house</i> sampai hari ini.</p>
<p>Baik Mbak, untuk bentuk koordinasi antara kedua pihak bagaimana ya? Apakah dalam pertemuan langsung atau via telepon?</p>	<p>Ada yang rapat langsung misal di kantor Dinas atau di Yayasan ya Mbak. Tapi tidak jarang pula kita <i>by call</i> atau <i>video call</i> untuk saling memberi kabar perkembangan penanganan kasus maupun perkembangan anak. Dan itu biasanya dilakukan oleh Ketua</p>

	Yayasan atau Koordinator <i>New Beginning</i> ya Mbak.
Baik, terima kasih Ibu untuk informasi yang sudah disampaikan hari ini. Ke depannya semoga Yayasan Pesan semakin dikenal di Kota Salatiga dan berdampak baik bagi pencegahan kekerasan anak dan perempuan.	Iya Mbak sama-sama, saya mewakili Yayasan juga mengucapkan terima kasih kepada Mbak Alfina karena diizinkan menjadi salah satu narasumber untuk penelitian skripsinya.

D. Narasumber 4

Nama : Cielo Octaviano
 Jabatan : Ketua Forum Anak Kota Salatiga Periode 2022-2024
 Waktu : Senin, 11 Desember 2023, Pukul 15.00 WIB
 Tempat : Kantor DP3APPKB Kota Salatiga

Pertanyaan	Jawaban
Halo, selamat sore. Untuk wawancara ini kita gunakan bahasa tidak baku saja ya supaya kamu lebih nyaman dalam menyampaikan pendapat. Perkenalkan aku Alfina Oktaviani, mahasiswa semester akhir Ilmu Pemerintahan UNDIP. Sebelumnya aku ucapkan terima kasih atas kesediaan waktu yang kamu berikan untuk berpartisipasi dalam pengumpulan data Tugas Akhir ku. Forum Anak Kota Salatiga (Rumanksa) sebagai representasi dan wadah anak-anak di tingkat kota, aku pilih sebagai salah satu subjek penelitian, karena sesuai dengan sasaran kebijakan dan program KLA. Maka dari itu apakah kamu bersedia untuk menjawab pertanyaan yang sudah tersusun di dalam <i>interview guide</i> ?	Selamat sore Kak Fina. Baik Kak, aku juga lebih leluasa kalau pakai bahasa yang lebih santai. Silakan dimulai saja kak.
Baik, sebagai permulaan aku ingin kamu memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Nama, kesibukan di sekolah, serta peran kamu di Rumanksa.	Perkenalkan namaku Cielo Octaviano, saat ini aku diamanahi menjadi Ketua Forum Anak Kota Salatiga periode 2022-2024. Kemudian untuk kesibukan saat ini menjadi mahasiswa aktif di Fakultas Psikologi UKSW.

<p>Salam kenal Cielo. Untuk awal mulanya bergabung di Rumanksa itu saat kamu kelas berapa?</p>	<p>Awal banget sebelum jadi pengurus saat Cielo kelas 8 SMP Kak.</p>
<p>Baik, aku akan mulai beberapa pertanyaan dasar dalam perspektif kamu sebagai anak ya. Pertama, aku ingin tahu apakah kamu merasa aman dan nyaman tinggal di Kota Salatiga? Khususnya sebagai anak yang punya hak-hak khusus untuk diakui.</p>	<p>Menurut Cielo sendiri Kota Salatiga ini nyaman ditinggali, apa lagi untuk anak-anak karena lingkungannya yang cenderung sejuk dan dikenal sebagai Kota Toleran. Kemudian secara fasilitas saat ini sudah memadai untuk anak-anak. Misalnya udah banyak taman kota, taman baca, CLC gitu kak. Meskipun kota kecil kita cari apa aja itu ada Kak. Terus dari fasilitas itu anak-anak merasa terbantu, khususnya untuk mengerjakan tugas kelompok atau sekedar main. Sudah ada tempat yang nyaman, fasilitas fisiknya macem-macem, jadi ya cukup memotong pengeluaran kami kak, misal mengerjakan tugas.</p>
<p>Baik Cielo, bisa aku pahami. Apakah fasilitas yang ada saat ini merupakan bentuk perkembangan beberapa tahun terakhir ini? Bagaimana jika dibanding saat kamu duduk di bangku SD atau SMP?</p>	<p>Iya Kak betul, yang aku rasakan sangat berkembang. Banyaknya ruang terbuka yang menjadi sarana bermain dan belajar anak sekitar 5 tahun terakhir ini sangat gencar dibangun. Menurut Cielo itu juga bagian dari kinerja pemerintah kota untuk meningkatkan pelaksanaan KLA ya Kak. Karena seperti Taman Cerdas di Blotongan itu kan dibangun juga untuk memenuhi pelaksanaan indikator KLA. Rasa-rasanya juga kalau zaman Cielo SD, SMP misal ada taman atau ruang terbuka gitu belum menyediakan kebutuhan anak. Terus juga rasanya memakai fasilitas tersebut tidak bisa sembarang orang, ya hanya dipakai oleh orang dewasa atau mungkin jajaran pemerintah saja. Anak-anak belum diarahkan untuk oh kalau mengerjakan tugas bisa disini ya, bisa kok kamu pakai fasilitas A, gitu Kak.</p>
<p>Baik Cielo, dari yang kamu sampaikan berarti fasilitas publik, khususnya ruang terbuka di Kota Salatiga sudah mengalami peningkatan dengan</p>	<p>Nah iya betul Kak. Terasa banget lah kalau sekarang.</p>

<p>menghadirkan fasilitas yang ramah anak ya.</p>	
<p>Oh iya tadi kamu sempat menyampaikan tentang CLC ya. Bisa dijelaskan bagaimana atau bentuk pelayanannya seperti apa?</p>	<p>Oh iya Kak, CLC itu Corner Learning Center yang dibuat oleh Dinas P3APPKB dan kerjasama dengan DLH Kak seingat Cielo. Isinya sendiri ada media informasi tentang anak, misal hak-hak anak, stunting, dan lainnya. Terus ada media bermain untuk anak, terutama mainan tradisional seperti dakon dan egrang tempurung kelapa. Tapi setahu Cielo fasilitas CLC hanya dibuka pada hari Jumat dan Sabtu, karena memang anak-anak banyak berkunjung ke taman saat hari tersebut.</p>
<p>Wah menarik ya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya, kamu sebagai seorang anak memposisikan diri dalam lingkungan keseharian dan pertemanan itu seperti apa?</p>	<p><i>Sebenarnya</i> dalam pertemanan Cielo pilih-pilih Kak, bukan berarti cuma mau berteman dengan yang kaya atau pintar, tapi lebih ke pertemanan yang mau mendukung gitu Kak, yang positif gitu Kak. Tapi memang Cielo pernah punya lingkup pertemanan yang kurang sehat Kak, saat SMP. Kebetulan saat itu Cielo masih sekolah di SMP yang pinggiran, ya walau Salatiga tapi kurang favorit gitu Kak. Terus ya banyak menemui kasus perundungan, kenakalan remaja dan pelanggaran yang menurutku tidak sesuai dilakukan oleh usia anak, sampai hamil di luar nikah Kak. Kemudian saat SMA aku sudah masuk ke sekolah yang favorit Kak, jadi Puji Tuhan tidak pernah menemui kenakalan yang begitu, paling ya wajar Kak ejek-ejekan verbal dan tidak berdampak besar. Dan hal baik itu berlanjut sampai kuliah Kak, tidak pernah Cielo temukan lagi pertemanan yang seperti di SMP.</p> <p>Karena aku cenderung pilih-pilih teman, di dalam kelompok pergaulan aku berusaha jadi orang yang membawa pengaruh positif sih Kak. Apalagi dengan aku bergabung di Rumangsa aku jadi punya banyak info yang bisa aku kasih ke temen-temen</p>

	dan harapannya bisa berpengaruh baik ke sekitar, gitu Kak.
<p>Baik, nah sejalan dengan kamu yang sudah cukup lama bergabung di Rumanksa dan kesadaran yang kamu punya akan perlindungan anak dari masa SMP, apakah kamu menyadari adanya perkembangan tentang kepedulian itu pada diri kamu?</p>	<p>Wah iya Kak bener banget, aku yang semula, saat SMP peduli tentang isu anak misal di angka 70-80% sekarang bisa aku katakan 100% Kak. Jadi waktu Cielo SMP dengan pertemanan dan kasus pada anak-anak yang demikian sebenarnya sudah sangat prihatin. Tapi saat itu aku rasanya belum punya keberanian dan pemahaman yang sebanyak sekarang Kak. Akhirnya yang aku bisa lakukan hanya sebatas melapor ke guru BK walau tindak lanjutnya menurutku saat itu kurang maksimal Kak. Karena maksimal di SMP hanya diberi surat peringatan, kecuali yang kasus hamil di luar nikah itu ya Kak, akhirnya dikeluarkan dari sekolah. Tapi kalau saat akhir-akhir SMA sampai saat ini aku sudah punya kesadaran dan keberanian penuh, jadi aku sudah paham dan berani lapor kemana seharusnya gitu Kak. Awal tahun kemarin aku melapor ke DP3APPKB jika ada tetanggaku yang di usia 6 tahun belum punya akta kelahiran dan posisi orang tuanya pergi semua, dia tinggal dengan nenek kakeknya, akhirnya bisa aku bantu urus Kak, dengan dukungan dari Dinas. Kemudian dengan bergabungnya aku di Rumanksa aku juga jadi tahu ternyata banyak cara atau media untuk melapor Kak, misal Pusaka, Sapa 129, atau langsung ke Dinas P3APPKB gitu Kak.</p>
<p>Baik Cielo. Kemudian berkaitan dengan ikutnya kamu dalam Rumanksa dan kepemimpinan di Kota Salatiga kan sudah cukup lama, jadi kamu juga sudah mengalami pergantian walikota saat mengurus Rumanksa. Nah perbedaan apa yang sangat terasa dari dua pemimpin, yaitu Pak Yuliyanto (walikota periode 2011-2021) dengan</p>	<p>Baik Kak kalau membahas dua pemimpin pemerintahan menurutku keduanya bagus dan baik, membawa kemajuan untuk Rumanksa dan anak di Kota Salatiga. Tapi keduanya yang aku lihat berbeda pendekatan Kak, Pak Yuliyanto lebih meranah pelibatan anak dalam pemerintahan sedang Pak Sinung meranah ke fasilitas. Pak</p>

<p>PJ Walikota Pak Sinung (menjabat 2022-sekarang)?</p>	<p>Yuliyanto selalu mengajak dan melibatkan anak di kegiatan dan rapat-rapat yang memang membutuhkan pandangan anak, misalnya dalam Musrenbang pengurus atau perwakilan Rumanksa selalu diundang dan diberi kesempatan menyampaikan pemikiran. Diikuti juga dalam upacara perayaan gitu Kak, meski tidak semua tapi selalu mengundang perwakilan. Di tahun pak Yuliyanto kan juga KLA masih dirintis ya Kak di Kota Salatiga, jadi fokusnya menurutku masih di pemerintahan, Gugus Tugas, dan birokrasi. Tapi sebagai permulaan itu sudah bagus. CLC dan taman-taman besar kan juga dibangun di era Pak Yuliyanto. Sedangkan jika Pak Sinung sebagai PJ walikota aku lihatnya ke fasilitas pada anak dan kehadiran beliau untuk anak sih Kak. Bulan November kemarin Rumanksa baru saja difasilitasi melakukan studi terap atau studi banding ke Forum Anak Sleman. Itu kami diberi kesempatan belajar banyak Kak. Kemudian juga Pak Sinung lebih banyak melakukan pendekatan dengan anak dan tinggi akan apresiasi. Sekarang kan lagi banyak peresmian sekolah ramah anak dan kegiatan karnaval yang pesertanya anak-anak Kak, nah beliau selalu hadir dan sering memberi motivasi. Jadi selain fasilitas pemerintah, secara pribadi beliau juga hadir untuk anak-anak, begitu Kak. Tapi bagi saya keduanya tetap baik, memberi pengaruh namun pada jalan atau caranya masing-masing.</p>
<p>Baik, nah ketika Rumanksa khususnya kamu, ikut dalam kegiatan yang berkaitan dengan pemerintahan dan pengusulan program seperti musrenbang, apakah kamu pernah berada di situasi yang membuat kamu</p>	<p>Pernah Kak, di agenda pemerintah seperti musrenbang aku hadir sebagai perwakilan anak Kota Salatiga ya Kak, seringkali waktu atau kesempatan yang diberikan kepada kami untuk menyampaikan gagasan dan isu anak dipotong. Banyak bapak/ ibu dari</p>

<p>kurang nyaman atau kurang didukung oleh lingkungan?</p>	<p>instansi pemerintah lain yang menggunakan kesempatan kami, atau mereka seakan menganggap kami sebagai hal yang bisa dilewatkan begitu saja kak. Misal ada omongan “oh udah aja forum anak, sudah paham kami,” nah omongan demikian sering Kak dilontarkan dalam forum yang menurut kami penting. Akhirnya kami seakan tenggelam Kak di dalam forum tersebut. Tapi memang di luar kesempatan lisan, pemerintah selalu menyediakan form atau lembar aspirasi yang bisa kami isi dan kami kumpulkan. Memang tersampaikan, tapi rasanya lebih enak kalau disampaikan langsung ya Kak, biar lebih meresapi apa yang dibutuhkan anak-anak. Nah mungkin demikian Kak aku menghadapi situasi yang membuat kurang nyaman.</p>
<p>Baik, berkaitan dengan aspirasi yang disampaikan secara tertulis apakah sudah ada tindakan konkret dari pemerintah sebagai bentuk tindak lanjut?</p>	<p>Menurut Cielo kami tidak bisa mengetahui sejauh mana aspirasi kita ditanggapi ya Kak. Karena setelah musrenbang pun tidak ada media untuk memantau kelanjutan aspirasi. Tapi sejauh ini perlahan tapi ada progres, aspirasi yang anak-anak sampaikan mulai terealisasi Kak. Contohnya pada musrenbang tahun 2022 dan 2023 ya Kak, kami meminta supaya Forum Anak diberi alokasi dana untuk mengadakan rapat koordinasi bulanan. Itu akhirnya juga direalisasikan Kak, sudah dari tahun 2022 sampai sekarang ada anggarannya. Kalau tahun-tahun sebelum aku menjabat jadi Ketua, belum ada Kak penyampaian aspirasi tentang pendanaan, jadi dari pemerintah tidak memberi alokasi ke kita.</p>
<p>Selain tanggapan positif yang demikian, apakah pernah jajaran pemerintah seakan menganggap kecil atau menyepelkan Forum Anak?</p>	<p>Kalau dari tingkat kota sepertinya nggak ada Kak, rata-rata kalau Bapak/Ibu di Dinas Kota selalu memudahkan Forum Anak. Tapi hal kurang mengenakan pernah kita dapati</p>

	<p>beberapa kali saat akan membentuk Forum Anak di tingkat kelurahan Kak. Mungkin mereka menganggap kita ini menambah tugas beliau ya, padahal ini juga salah satu usaha meningkatkan indikator pelaksanaan KLA di Kota Salatiga. Sepertinya pejabat di tingkat kelurahan masih kurang memahami Forum Anak dan kurang ada rasa peduli terhadap anak. Misalnya saat akan ada rapat awal pembentukan KLA, kami dari Rumanksa menitipkan surat undangan ke masing-masing kelurahan untuk dibagikan ke anak-anak di lingkungannya (RT dan RW), tapi sampai H-1 kami <i>follow up</i> ternyata surat tersebut baru akan dibagikan. Bukan berburuk sangka, tapi bisa aja kalau nggak kita <i>follow up</i> H-1 malah lupa dibagikan kan Kak. Kayak gitu sih Kak yang menurutku menghambat kami. Aku juga berkali-kali menekankan ke Ayah-Bunda di kelurahan supaya mendukung anak-anak di Forum Anak kelurahan, karena merekalah yang sebenarnya akan meringankan tugas Ayah-Bunda, istilahnya menjadi pionir positif bagi kegiatan anak-anak di tingkat kelurahan. Tapi faktanya masih sedikit Ayah-Bunda yang punya pemahaman demikian Kak.</p>
<p>Kalau dilibatkan dalam penyusunan kebijakan, apakah sudah tercapai ya kondisi tersebut? Khususnya kebijakan tentang perlindungan khusus dan penyusunan mekanisme tanggap bencana yang ramah anak di Kota Salatiga.</p>	<p>Belum sih Kak, belum pernah. Paling mentok diajak di Musrenbang atau diskusi internal di Bidang KPA berkaitan dengan aspirasi atau kegiatan.</p>
<p>Sekarang kita akan ke pertanyaan seputar kegiatan Forum Anak dan kegiatan penguatan hak anak yang ada di Kota Salatiga ya. Sepanjang tahun 2023 apa saja kegiatan yang diselenggarakan DP3APPKB untuk anak?</p>	<p>Jadi tahun 2023 ini banyak sekali ya Kak kegiatan dari DP3APPKB. Karena kan suasana sudah mulai normal, tidak ada pandemi. Sedangkan dari 2019 akhir sampai 2022 kegiatan cenderung dibatasi karena peraturan dan demi keselamatan bersama ya Kak. Sehingga</p>

pada tahun ini rasanya semangat yang 2-3 tahun sudah kami simpan bisa kembali dimunculkan, jadi sangat menggembirakan dan akhirnya banyak kegiatan yang bisa diselenggarakan. Mulai dari musrenbang tatap muka, sosialisasi Agen 2P, sosialisasi pencegahan perkawinan dini, adanya rapat rutin Rumanksa, hingga puncaknya pada perayaan HAN dan kongres anak.

Selain itu kegiatan yang aku rasa sangat berdampak bagi anak-anak di Kota Salatiga sepanjang tahun 2023 yaitu Kongres Anak dan Perayaan HAN Kota Salatiga, kegiatan ini sangat berdampak karena antara Rumanksa dan DP3APPKB, bisa saling terhubung dan bekerjasama. Dari perayaan tersebut juga ada rangkaian pembentukan Forum Anak di tingkat keluraha. Saat ini 23 kelurahan di Kota Salatiga sudah memiliki Forum Anak yang semula di awal tahun hanya ada 3 Forum Anak sekarang semua kelurahan sudah terbentuk. Jadi mendongkrak penilaian KLA di tahun mendatang dan memberi wadah nyata bagi anak-anak di lingkup terkecilnya. Selain berhasil membentuk 23 Forum Anak kelurahan, dari perayaan HAN kita juga sangat senang dan merasa membawa manfaat bagi para peserta karena di dalam sesi materi diisi oleh narasumber luar biasa seperti perwakilan Forum Anak Jawa Tengah, dari UNICEF Indonesia gitu. Itu kan menjadi pengenalan dan memberi kesan baik bagi anak-anak yang baru pertama mengikuti kegiatan Rumanksa.

Selain perayaan, kegiatan tahun ini yang berkesan adalah kegiatan Rumanksa yang *disupport* oleh DP3APPKB, yaitu adanya *Roadshow* Forum Anak ke beberapa sekolah.

	<p>Disitu kami mengenalkan Forum Anak ke siswa SMP dan SMA, kemudian kami juga menjaring aspirasi, hal-hal apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh anak, masalah apa yang ada di tingkat SMP/ SMA. Dari situ Cielo jadi tahu oh sejauh mana Forum Anak dikenal, sejauh apa mereka tahu tentang kami, dan kendala mereka saat ini. Hal-hal tersebut menurutku yang sangat berkesan.</p>
<p>Dari berbagai kegiatan yang kamu ikuti atau diselenggarakan DP3APPKB untuk anak-anak, adakah kegiatan yang bersifat memungut biaya dari anak?</p>	<p>Sejauh ini tidak ada ya Kak, baik anggota Rumanksa maupun anak-anak sebagai peserta kegiatan tidak pernah dipungut biaya, semuanya gratis dan tidak ada perbedaan perlakuan antara yang pengurus di tingkat kota, kecamatan, kelurahan, termasuk anak-anak yang menjadi peserta kegiatan. Puji Tuhannya semua difasilitasi Dinas, baik dari konsumsi, akomodasi dan lainnya. Contoh kecilnya saat kami akan rapat, tempat disediakan, audio dipasangkan, konsumsi juga dan kami tidak disuruh membayar. Bahkan kalau kami butuh pertemuan skala besar dengan Gedung Pertemuan Daerah seperti di Gedung Kaloka Pemkot, kami tidak pernah disuruh membayar. Misal konsumsi ada sisa pun seringnya dikasih, dibagi ke kami Kak.</p>
<p>Baik Cielo, kita beralih ke topik KLA ya. Apa yang kamu pahami tentang Kota Layak Anak? Dan bagaimana perkembangannya di Kota Salatiga?</p>	<p>Iya Kak, jadi sepemahaman Cielo tentang KLA adalah konsep kota sebagai tempat tinggal yang menjunjung hak anak dan memberi rasa aman maupun nyaman kepada anak-anak yang tinggal di dalamnya. Hak anak tersebut tidak hanya harus dipenuhi oleh keluarga, tetapi juga diakui oleh pemerintah Kota Salatiga, begitu Kak.</p> <p>Sampai saat ini Kota Salatiga kan sudah mengantongi predikat KLA madya ya Kak, menurut Cielo itu menjadi PR bersama juga, khususnya Forum Anak dan DP3APPKB, walau</p>

	<p>sebenarnya PR bersama masyarakat. Gimana caranya pada tahun 2024 KLA ini bisa meningkat ke nindya, karena beberapa tahun kita di madya walau mengalami kenaikan poin, sedikit-sedikit.</p>
<p>Baik, kalau untuk kondisi kekerasan anak di Kota Salatiga bagaimana kamu melihatnya?</p>	<p>Kalau dari pelaporan tahun ke tahun naik ya Kak datanya, menurut ku itu kondisi yang memprihatinkan ibaratnya kita dari Forum Anak sudah berusaha memberikan yang terbaik untuk segi anak-anak, misal dari sosialisasi menjadi Agen 2P itu. Tapi menurut Cielo adanya kenaikan kasus kekerasan akhir-akhir ini karena ada fenomena sosial baru yang misal 5-10 tahun lalu tidak terjadi atau dialami anak-anak. Misal saat ini hampir semua anak SD, bahkan TK sudah mengerti menggunakan <i>gadget</i>, yang di dalamnya sangat beragam isi yang bisa dicari, konten-konten gitu, yang bisa saja menjerumuskan anak ke dalam tindak kekerasan. Karena kalau dulu sebelum anak mengenal <i>gadget</i> mungkin minim kekerasan daring ya Kak, nah kalau sekarang bisa kita temui kekerasans seksual, pelecehan dari media <i>online</i>. Jadi kekerasan bisa merambat ke jalan lain, makanya kasusnya pun juga naik Kak. Hal itu bisa menjadi salah satu cara lah menurutku Kak.</p>
<p>Bisa dipahami, kemudian berkaitan dengan program kerja atau kegiatan KLA, apakah Forum Anak juga diikuti dalam perencanaannya?</p>	<p>Ada Kak, kami diikuti. Contoh nyata dan akan dilakukan dalam waktu dekat yaitu, dari Bidang KPA ada inovasi <i>Kondo Joko, Konco Dijogo Ojo Nganti Rekoso</i>. Inovasi itu bentuknya lagu dan tarian, <i>jingle</i> gitu Kak. Nah Forum Anak dilibatkan untuk ikut dalam <i>flash mob</i> dan pembuatan video dokumentasinya. Kemudian terkait anak-anak dengan kebutuhan khusus atau disabilitas, DP3APPKB mengajak Forum Anak untuk memberi motivasi dan merangkul teman-teman di usia</p>

	<p>sebaya. Itu kegiatannya juga bagus dan meriah Kak, karena kan melibatkan anak disabilitas se-Kota Salatiga. Dan menurut aku itu bentuk pelibatan seluruh anak di Kota Salatiga, karena pada akhirnya tidak ada perbedaan antara anak yang berkebutuhan khusus dengan yang tidak. Tahun lalu kami juga sempat melakukan kunjungan ke SLB untuk bermain dan belajar bersama, gitu Kak.</p>
<p>Baik, jika berkaitan dengan Rumanksa, bagaimana arus komunikasi dan koordinasi berjalan?</p>	<p>Kalau di Rumanksa koordinasi sejauh ini aman aja Kak, berjalan lancar walau kadang ada <i>miss</i> komunikasi maupun <i>miss</i> persepsi, karena kan namanya anak-anak ya Kak, masih butuh banyak dibimbing, diajarin, dan dikasih tahu. Sebenarnya juga nggak terlalu fatal, nggak mempengaruhi citra dan keberjalanan organisasi sampai parah. Tapi alangkah baiknya memang anak diarahkan, gitu Kak. Misal dalam hal surat menyurat, kadang anak-anak pengurus Rumanksa, terutama yang masih SMP melakukan kesalahan koordinasi. Harusnya misal dalam acara Forum Anak kelurahan urut tertata dari kelurahan – kecamatan – Dinas Kota, nah ada yang langsung mengirim surat ke Dinas P3APPKB. Ya <i>sebenarnya dilayanin</i> juga Kak oleh Dinas, tapi akhirnya kami yang di pengurus Rumanksa, terlebih yang SMA sering mengingatkan untuk melakukan administrasi dengan urut biar kedepannya lebih aman dan rapi.</p>
<p>Oh begitu ya. Memang kalau di Forum Anak, baik kelurahan, kecamatan, maupun kota didominasi oleh anak usia berapa Cielo?</p>	<p>Jadi kalau untuk anggota di tingkat kelurahan sampai kota ada yang masih di usia SD ya kak, 10-12 tahun. Tapi untuk kepengurusan di seluruh tingkatan Forum Anak paling kecil ada di tingkat SMP kelas 8. Maksimal pengurusnya di usia 18 tahun Kak.</p>
<p>Baik, sebagai pertanyaan penutup, apa yang kamu harapkan dan cita-citakan ke depannya, baik untuk Rumanksa</p>	<p>Menurut Cielo hal utama yang harus dilanjutkan Rumanksa adalah semakin giat melakukan pendekatan praktis</p>

<p>maupun upaya perlindungan khusus anak di Kota Salatiga?</p>	<p>kepada anak-anak di Salatiga. Memang ya Kak dengan ada acara sosialisasi atau seminar, membawakan materi itu bagus untuk anak-anak. Tapi Cielo rasa, anak butuh yang namanya contoh dan praktik, makanya Cielo lebih <i>pengen</i> kalau Rumanksa bisa melakukan pendekatan praktis ke anak-anak. Jadi kita pun bisa saling tahu, oh dari materi yang disampaikan pemahaman anak-anak bagaimana, apa yang harus kita lakukan menghadapi kondisi anak macam-macam, dan semacamnya Kak. Jadi simpelnya konsep yang ingin Cielo bawa adalah tindak lanjut dari materi yang sudah diberikan, karena kalau cuma mengandalkan materi bisa aja masuk telinga kanan keluar telinga kiri, gitu Kak.</p> <p>Nah kondisi yang ingin Cielo bawa itu juga harus diawali dengan koordinasi dan komunikasi yang bagus di dalam Forum Anak Kak. Jadi kita harus membangun kedekatan dulu, gitu. Karena <i>chemistry</i> yang baik ini, aku yakin bisa mendukung kegiatan kita ke depannya.</p> <p>Sedangkan untuk kegiatan yang kaitannya dengan penanganan kasus kekerasan anak, Cielo harap bisa semakin terlihat aksinya ya Kak, baik itu preventif maupun dalam penanganannya.</p>
<p>Baik Cielo. Berkaitan dengan penanganan kasus, apakah Forum Anak pernah dilibatkan oleh Dinas P3APPKB dalam kegiatan tersebut?</p>	<p>Kalau penanganan kasus spesifik gitu belum ya Kak, karena kan sudah ada karyawan dan isunya sulit dipahami anak-anak gitu. Tapi Rumanksa pernah diajak berkolaborasi dengan Bidang KPA untuk mendampingi anak-anak di Kota Salatiga yang kehilangan orang tuanya karena pandemi Covid-19. Menurut Cielo itu suatu kegiatan yang berkesan, karena Forum Anak bisa hadir untuk teman sebaya yang sedang mengalami kesulitan, dan kami sebagai</p>

	suatu forum atau kelompok pun merasa senang bisa membantu dan dilibatkan oleh pemerintah. Disitu kita bisa menghibur anak-anak, mengajak belajar dan memberi semangat ke mereka. Untuk rentan usia pun beragam, kalau selama di Rumanksa yang kita hadapi anak usia SD-SMA, kebanyakan SMP-SMA, nah kalau dalam kegiatan ini kita benar-bener ketemu sama anak-anak kecil yang bahkan belum sekolah, gitu Kak. Yang mana mereka sangat kecil ya Kak, bisa aja mereka itu belum paham apa yang terjadi pada keluarganya, belum paham konsep kehilangan.
Oh iya paham, berarti bentuknya trauma <i>healing</i> untuk anak-anak ya.	Iya betul Kak, trauma <i>healing</i> .
Baik Cielo, demikian yang ingin aku tanyakan, kamu sudah sangat informatif dan membantu pengumpulan data skripsi ku. Terima kasih banyak semoga selalu diberi kelancaran dalam berbagai kegiatan ya.	Baik Kak, senang bisa membantu. Terima kasih kembali Kak.

E. Narasumber 5

Nama : Ano
 Peran : Perwakilan anak
 Waktu : Senin, 11 Desember 2023, Pukul 15.30 WIB
 Tempat : Kantor DP3APPKB Kota Salatiga

Pertanyaan	Jawaban
Halo, selamat sore. Untuk wawancara ini kita gunakan bahasa tidak baku saja ya supaya kamu lebih nyaman dalam menyampaikan pendapat. Perkenalkan aku Alfina Oktaviani, mahasiswa semester akhir Ilmu Pemerintahan UNDIP. Sebelumnya aku ucapkan terima kasih atas kesediaan waktu yang kamu berikan untuk berpartisipasi dalam pengumpulan data skripsiku. Aku memilih kamu sebagai salah satu subjek penelitian, yaitu perwakilan	Selamat sore Kak Fina. Baik Kak, silakan dimulai saja kak.

anak di Kota Salatiga karena sesuai dengan sasaran inti dari kebijakan dan program KLA. Maka dari itu apakah kamu bersedia untuk menjawab pertanyaan yang sudah tersusun di dalam <i>interview guide</i> ?	
Kalau begitu silakan perkenalkan diri kamu ya. Meliputi nama dan kesibukan saat ini.	Baik Kak. Perkenalkan aku Ano, saat ini bersekolah di SMP Negeri 6 Salatiga kelas XI. Kebetulan aku cukup aktif di lingkungan rumah Kak, aku tergabung jadi anggota Forum Anak Kelurahan Tegalrejo dan sering terlibat dalam kegiatan di RT maupun kelurahan.
Kalau begitu kita mulai ya Ano. Sebagai anak, apa yang membuat kamu merasa aman dan nyaman tinggal di Kota Salatiga?	Pertama karena di lereng Gunung Merbabu, jadi lingkungannya sejuk, dingin gitu Kak. Jadi mau apa-apa itu nyaman. Terus juga karena kota kecil jadi rasanya aman, nggak menakutkan, nggak ada masalah yang serius di masyarakat.
Masalah serius itu contohnya yang seperti apa?	Ya misal ribut-ribut satu RT gitu Kak, atau kalau di tingkat kota ya demo gitu. Kan nggak pernah Kak, jadi nyaman hidup di Salatiga.
Baik, kalau dari sisi kehidupan atau lingkungan sosialnya bagaimana? Apakah kamu nyaman?	Nyaman Kak, apa lagi sekarang sudah banyak fasilitas ramah anak, jadi mau beraktivitas itu rasanya didukung. Terus kan kalau di sekolah ada sekolah ramah anak Kak, jadi rasanya lebih aman dan dihargai sebagai anak. Di lingkungan rumah pun juga cenderung aman. Orang tua tuh tahu posisi dan peran anak seberapa, tetangga juga kalau di depan anak-anak sopan, baik gitu Kak.
Oh iya baik Ano. Nah sebagai anak tentu kamu punya teman sebaya ya. Bagaimana hubungan kamu dengan mereka? Baik di lingkungan tempat tinggal maupun di sekolah.	Alhamdulillah baik Kak, aman. Belum pernah terjerumus di lingkungan yang tidak sehat atau buruk. Pertemanan saya baik-baik karena dari keluarganya baik Kak, di sekolah juga nggak <i>neko-neko</i> .
Oh iya syukur ya. Nah latar belakang keluarga teman-teman dan kamu, yang baik itu seperti apa contohnya?	Misalnya Kak aku main ke rumah temanku, orang tuanya selalu ramah, kadang ikut ngobrol dengan kami, kalau sudah sore saya belum pulang

	<p>gitu sering <i>diingetin</i> “Ano kamu udah dicari orang tua belum,” gitu Kak, kan saya jadi paham. Terus cerita dari <i>temen</i> saya sendiri sih Kak, misal dia curhat ke ibunya, nah ibunya memberi solusi gitu, bukan marah atau diem aja. Orang tua saya juga alhamdulillah baik Kak, termasuk tetangga juga. Jadi rasanya bersosialisasi itu senang.</p>
<p>Baik, kalau begitu sebagai anak apakah kamu pernah ada di posisi yang membuat kamu tidak nyaman?</p>	<p>Kadang-kadang sih Kak. Biasanya aku nggak nyaman kalau obrolan teman kurang nyambung atau tidak sefrekuensi. Jadi aku milih minggir aja karena nggak cocok. Kalau di rumah ya kadang namanya orang tua ada ribut-ribut ya Kak, nah itu aku biasanya biar agak nggak kepikiran masuk ke kamar. Kadang juga orang tua nyuruh saya belajar terus gitu, kan saya jadi nggak nyaman ya ke kamar. Ya walaupun saya terus belajar dikit gitu Kak. Tapi baik di rumah maupun di pertemanan, kalau memang saya yang membuat nggak nyaman saya selalu minta maaf Kak. Bisa saat itu juga, atau besok ketika kondisinya sudah enak, gitu.</p>
<p>Apakah kamu pernah ikut dalam kegiatan yang diselenggarakan Dinas P3APPKB?</p>	<p>Kebetulan saya jadi Forum Anak di kelurahan dan kota kan baru tahun ini ya Kak, itu pun baru kemarin bulan Juni. Jadi saya sudah ikut dua kegiatan dari Dinas. Pertama perayaan HAN sekaligus Kongres Anak Kota Salatiga dan yang kedua studi terap ke Forum Anak Kabupaten Sleman.</p>
<p>Tapi sebelum tergabung dalam Forum Anak apakah kamu sudah tahu ada komunitas ini?</p>	<p>Sudah Kak, kebetulan kalau di SMP banyak kakak kelas yang sudah lebih dulu ikut, jadi sudah nggak asing. Terus Rumanksa juga melalui Instagram sering membuat <i>postingan</i> jadi kami yang dulunya belum tergabung bisa saja sudah tahu ada komunitas ini Kak.</p>
<p>Baik, dari kegiatan yang kamu ikuti itu, apakah kamu pernah diharuskan membayar atau dipungut biaya?</p>	<p>Alhamdulillah nggak pernah Kak. Semuanya sudah ditanggung DP3APPKB.</p>

<p>Nah kalau kegiatan yang kamu ikuti sebagai Forum Anak di tingkat kelurahan, apakah ada fasilitas yang diberikan oleh DP3APPKB?</p>	<p>Oh iya Kak, bentuk fasilitasnya beragam. Jadi apa pun yang berkaitan dengan forum anak atau anak pasti DP3APPKB yang menyediakan keperluannya. Mulai dari konsumsi, ruangan, sampai surat menyurat itu disediakan Kak, asal kami lapor butuh apa aja gitu.</p>
<p>Bagaimana kalau Forum Anak di tingkat kelurahan? Apakah sudah ada pelibatan anak dalam kegiatan yang diselenggarakan Kelurahan Tegalorejo?</p>	<p>Kalau di kelurahan kami sudah pernah dua kali kegiatan Kak. Pertama setelah pembentukan kami ada rapat koordinasi dengan Lurah nya. Disitu kami menyampaikan hal apa saja yang kami butuhkan, waktu itu yang paling banyak disampaikan tentang ketersediaan ruang untuk rapat Kak. Kemudian yang kedua ada pelibatan anak dalam kolaborasi karang taruna kelurahan dengan kelurahan saat sapanan merti desa Kak. Disitu kami sebagai anak diajak untuk membantu dan dibimbing oleh karang taruna.</p>
<p>Baik. Kalau selama tahun 2023 ini bagaimana kamu melihat fasilitas yang disediakan oleh pemerintah Kota Salatiga kepada anak?</p>	<p>Kalau fasilitas fisik seperti yang saya sampaikan di awal ya Kak, sudah sangat banyak dan terbuka untuk anak. Sudah banyak taman bermain, tempat belajar yang ramah anak. Bahkan di lingkungan rumah saya, di daerah Sub Inti Kelurahan Tegalorejo, sudah ada 3 taman untuk anak-anak Kak yang dibangun dari akhir tahun 2022. Kondisinya juga nyaman dan terawat Kak. Untuk fasilitas non fisik seperti kesempatan untuk anak belajar itu juga sudah semakin bagus Kak, apalagi kemarin kan Forum Anak sempat difasilitasi untuk studi terap.</p>
<p>Berkaitan dengan fasilitas fisik seperti taman di daerah rumahmu, apakah sepenuhnya berfungsi? Karena ada cukup banyak ya di satu lingkungan.</p>	<p><i>Sebenarnya</i> yang sangat berfungsi itu cuma 2 Kak. Tapi yang 1 tetap terawat dan kadang jadi tempat perkumpulan.</p>
<p>Kalau dalam pengambilan keputusan, penyusunan kebijakan apakah kamu pernah dilibatkan? Atau sekedar tahu tentang informasi penyusunan</p>	<p>Belum pernah Kak.</p>

kebijakan yang melibatkan anak selain tentang Forum Anak.	
Berarti untuk penyusunan mekanisme penanggulangan bencana yang ramah anak juga belum pernah terlibat ya?	Iya belum pernah Kak, pokoknya kalau udah di pemerintah gitu saya nggak pernah ikut kecuali di tingkat kelurahan Kak. Setahu saya cuma ada musrenbang yang memang perwakilan Forum Anak diundang, gitu Kak.
Baik, kita beralih ke pertanyaan seputar KLA ya. Aku ingin tahu pemahaman kamu tentang KLA, bisa tolong dijelaskan ya.	Kebetulan aku tahu istilah KLA baru tahun lalu Kak, jadi mungkin masih kurang sempurna ya pemahamannya. KLA menurutku kondisi kota yang memenuhi hak-hak anak, baik fasilitas fisik maupun hak lain, seperti pelayanan untuk anak.
Kemudian apakah kamu mengikuti perkembangan kekerasan anak di Kota Salatiga?	Iya Kak, beberapa kali baca dan <i>dapet</i> info dari teman atau keluarga.
Apa saja kasus kekerasan anak yang kamu ketahui?	Karena di lingkungan yang saya huni nggak ada, jadi ini kekerasan terhadap anak yang saya tahu dari orang lain ya Kak. Contohnya kekerasan seksual yang terjadi pada anak SD Kak. Tapi memang <i>sebenarnya</i> di sekolahnya di kabupaten gitu Kak.
Bagaimana tanggapanmu tentang hal itu?	Prihatin ya Kak, harusnya kan usia anak belajar dan bermain aja ya Kak, tapi ini harus dihadapkan sama hal yang buruk.
Sebagai bagian dari Rumangsa, pernahkah kamu menyampaikan aspirasi anak kepada jajaran pemerintah?	Pernah Kak, tapi baru di tingkat kelurahan. Jadi pada forum dengan Pak Lurah saya mewakili teman-teman menyampaikan kebutuhan kami Kak, yaitu ruang untuk rapat atau berkumpul, gitu. Kemudian kalau di Rumangsa bukan secara langsung ke pemerintah Kak, tapi saya menampung aspirasi teman di SMP kemudian saya kumpulkan di Rumangsa dan diteruskan ke pemerintah kota, begitu Kak.
Dari aspirasi yang kamu sampaikan apakah ada tindak lanjut dari pemerintah?	Untuk yang fasilitas Forum Anak tingkat kelurahan itu bilangannya akan direalisasikan di tahun depan, gitu Kak. Kalau yang di tingkat pemerintah kota menurut saya aspirasi yang saya bawa

	belum dipenuhi sih Kak. Saya juga nggak tahu apakah akan ditindaklanjuti atau nggak.
Sebagai bagian dari Forum Anak di tingkat kelurahan dan kota, bagaimana komunikasi dan koordinasi terjalin?	Jadi yang pertama di kelurahan ya Kak, ya kami sebatas rapat koordinasi itu satu kali dan selebihnya komunikasi di <i>WhatsApp group</i> . Tapi karena rata-rata sekolah jadi kami belum yang akrab banget Kak. Kalau pas ada kegiatan atau informasi dari kelurahan ya itu kita seringnya ketemu langsung dan dibantu atau diajari sama Bapak/ Ibu di kelurahan. Sedangkan kalau di Forum Anak Kota Salatiga sudah bagus sih Kak komunikasinya. Soalnya kan banyak yang sudah lebih besar, ada yang SMA, jadi ada yang membimbing dengan enak. Terus saya sebagai anggota merasa informasi tersampaikan dengan baik ke kita. Kendalanya kalau mau ada kegiatan sering molor Kak.
Harapan kamu sebagai anak di Kota Salatiga, Forum Anak ke depannya bisa seperti apa?	Pertama harapannya fasilitas fisik bisa segera ada yang khusus untuk Forum Anak gitu Kak, soalnya kami kalau rapat kan harus di dalam kantor Dinas. Kemudian untuk jajaran pemerintah, harapan ku bisa lebih mengajak partisipasi anak ke dalam agenda pemerintahan Kak. Misal Forum Anak di kelurahan bisa lebih merangkul anak. Terus ya pengennya untuk Rumangsa ke depannya bisa semakin dikenal dan diberi kelancaran dalam setiap kegiatannya Kak, jadi bisa menginspirasi teman-teman.
Baik terima kasih banyak Ano, informasi yang kamu sampaikan sangat membantu aku. Semoga kamu selalu diberi kelancaran dalam pendidikan dan berkegiatan.	Sama-sama Kak, semangat selalu ya Kak.

F. Narasumber 6

Nama : Anastasya Lidya
 Peran : Perwakilan anak
 Waktu : Senin, 11 Desember 2023, Pukul 15.45 WIB
 Tempat : Kantor DP3APPKB Kota Salatiga

Pertanyaan	Jawaban
Halo, selamat sore. Untuk wawancara ini kita gunakan bahasa tidak baku saja ya supaya kamu lebih nyaman dalam menyampaikan pendapat. Perkenalkan aku Alfina Oktaviani, mahasiswa semester akhir Ilmu Pemerintahan UNDIP. Sebelumnya aku ucapkan terima kasih atas kesediaan waktu yang kamu berikan untuk berpartisipasi dalam pengumpulan data skripsiku. Aku memilih kamu sebagai salah satu subjek penelitian, yaitu perwakilan anak di Kota Salatiga karena sesuai dengan sasaran inti dari kebijakan dan program KLA. Maka dari itu apakah kamu bersedia untuk menjawab pertanyaan yang sudah tersusun di dalam <i>interview guide</i> ?	Selamat sore Kak Fina. Baik Kak, aku bersedia.
Untuk mengawali wawancara tolong kamu perkenalkan diri kamu terlebih dahulu. Baik nama dan kesibukan saat ini.	Halo Kak, perkenalkan aku Anastasya Lidya saat ini aku sekolah di tingkat SMA, yaitu di SMA Negeri 3 Salatiga kelas X. Kesibukanku selain sekolah, di lingkungan ikut karang taruna Kak.
Baik, salam kenal Lidya. Kita mulai dari pertanyaan dasar tentang anak ya. Sebagai seorang anak, apa yang membuat kamu merasa aman dan nyaman tinggal di Kota Salatiga?	Karena di Salatiga lingkungannya sejuk, nyaman, apalagi untuk bermain-main di luar sangat mendukung Kak.
Baik, kalau selain kondisi alamnya yang cenderung sejuk, apakah ada alasan lain? Bisa dari segi sosial atau lingkungan sehari-hari kamu.	Menurutku karena Kota Salatiga itu kecil ya Kak, jadi mau kemana-mana dekat, aman, nggak ada huru hara yang menakutkan. Kemudian kalau dari tetangga dan teman di sekolah nyaman semua Kak, tidak pernah mendapat perlakuan yang tidak sopan.
Nah, perlakuan yang tidak sopan itu seperti apa ya?	Seperti perlakuan yang membuat kita tidak nyaman Kak. Misal ada <i>catcalling</i> , atau kumpulan orang yang

	tiba-tiba berperilaku tidak baik seperti saling lempar atau bentrok gitu Kak. Aku belum pernah menemui sih alhamdulillah.
Bagaimana hubungan kamu dengan teman sebaya baik di rumah maupun sekolah?	Baik Kak. Tapi aku pernah terjerumus di pertemanan yang kurang sehat saat SMP. Karena saat itu situasinya pandemi, jadi kami nggak punya kesempatan untuk saling mengenal Kak. Selama <i>online</i> udah berkomunikasi, oh ternyata waktu tatap muka nggak cocok dengan mereka, gitu Kak. Tapi kalau untuk pertemanan saat ini aku merasa di tempat yang pas, cocok gitu Kak. Kami juga saling dukung ke hal-hal positif.
Baik, ketika kamu ada di pertemanan atau lingkungan yang membuat kamu tidak nyaman bagaimana cara kamu mengatasinya?	Aku menyadari kalau pertemanan itu nggak baik untuk diri sendiri dan memilih keluar Kak. Soalnya kalau nggak berani bertindak gitu, takutnya nanti bisa berlarut-larut dan menimbulkan efek negatif ke aku.
Kalau selain dari pertemanan, apakah pernah dari sisi keluarga ada kondisi yang membuat kamu tidak nyaman dan merasa tidak aman?	Sejauh ini nggak pernah Kak, karena keluarga memberi aku kesempatan Kak, ya ke anak-anaknya lah untuk memilih hal yang disukai. Kalau pun aku ada salah, orang tua selalu mengingatkan dengan baik. Misal nadanya tinggi ya aku mencoba menahan diri biar nggak terlalu baper. Karena yang disampaikan orang tua demi kebaikanku.
Sebagai anak di Kota Salatiga, pernahkah kamu mengikuti kegiatan yang mendukung hak anak?	Pernah Kak, aku kemarin yang paling berkesan ikut Perayaan HAN yang diadakan DP3APPKB dan sosialisasi tentang pencegahan perkawinan dini.
Dari mana kamu tahu informasi tersebut? Apakah kamu diharuskan membayar untuk ikut dalam kegiatan tersebut?	Aku ikut karena ada informasi dari sekolah Kak, yang berminat bisa mendaftar gitu. Jadi aku mendaftarkan diri ke DP3APPKB, terus juga nggak disuruh membayar Kak. Semua fasilitasnya gratis, baik konsumsi, tempat menginap, sampai dikasih baju kegiatan. Dari situ aku juga jadi menambah pertemanan se-Salatiga Kak.

<p>Selain kegiatan perayaan, apakah kamu pernah ikut dalam forum pengambilan keputusan bersama jajaran pemerintah?</p>	<p>Nggak pernah Kak, setahuku itu hanya yang ikut Forum Anak. Tapi menurutku sekarang kondisi Salatiga udah bagus ke anak-anak Kak, lebih peduli ke anak. Jadi kayaknya hasil tersebut nggak lepas dari pengaruh Forum Anak, meski hanya perwakilan yang diajak di forum diskusi.</p>
<p>Baik, kalau begitu apakah saat ini di Kota Salatiga kamu sudah bisa merasakan kemajuan pemenuhan hak anak?</p>	<p>Sudah Kak. Sekarang kan banyak, hampir di setiap kecamatan sudah ada taman atau ruang terbuka yang isinya ramah anak, ada mainan gitu. Jadi menurutku fasilitasnya sudah bagus. Kalau soal kebutuhan surat atau lainnya sudah bagus sih Kak, kayaknya sekarang mengurus apapun udah mudah.</p>
<p>Satu tahun terakhir ini, menurutmu bagaimana pemimpin di Kota Salatiga, yakni PJ Walikota Salatiga Bapak Sinung memperlakukan anak-anak?</p>	<p>Beliau sangat ramah dan baik ke anak-anak. Soalnya kan sering memberi hadiah, sering hadir di acara anak-anak gitu Kak. Jadi tinggi apresiasi Kak, bikin anak-anak <i>seneng</i>.</p>
<p>Baik, untuk KLA sendiri apakah kamu sudah pernah dengar istilah itu? Apa yang kamu pahami tentang KLA?</p>	<p>Pernah Kak. KLA yang aku tahu itu kondisi kota yang mempedulikan hak anak dan diperlakukan dengan baik.</p>
<p>Kalau begitu apakah kamu mengikuti perkembangan kasus kekerasan terhadap anak di Kota Salatiga?</p>	<p>Iya Kak, ya tapi hanya dari dengar-dengar saja dan dari sosialisasi yang aku ikuti, kan disampaikan jumlahnya gitu.</p>
<p>Apakah ada kasus spesifik yang kamu ketahui?</p>	<p>Baru aja sih Kak di sekolah ada berita kekerasan seksual terjadi di SMA ku. Kalau yang lain pernah dengernya anak yang mendapat kekerasan dari ayah karena masalah ekonomi, jadi dilampiaskan ke anaknya.</p>
<p>Bagaimana kamu melihat kondisi tersebut? Apa perasaan kamu sebagai sesama anak?</p>	<p>Miris dan prihatin sekali Kak. Aku juga merasa lebih beruntung bisa hidup di lingkungan keluarga yang baik. Hal tersebut terjadi kalau menurut ku karena pergaulan yang kurang baik dan keluarga atau orang tua yang kurang perhatian gitu Kak.</p>
<p>Selain perasaan prihatin, apakah kamu pernah melakukan pelaporan atau inisiatif lain?</p>	<p>Pernah Kak, aku lapor ke Guru BK untuk ditangani, tapi tidak ada tindak lanjut akhirnya aku lapor ke DP3APPKB. Waktu itu ada kasus</p>

	perundungan gitu Kak, kebetulan korbannya adalah teman dekatku, jadi aku merasa kasihan terus berani lapor.
Bagaimana penanganan atau tindak lanjut dari pelaporan yang kamu buat?	Karena waktu itu masa pandemi ya Kak, dan sudah di masa lulus SMP tapi belum masuk SMA, akhirnya sama Dinas didatangi ke rumah Kak. Diberi motivasi terus dibantu waktu awal-awal masuk SMA biar nggak trauma.
Sebagai anak di Kota Salatiga, apa harapan kamu kepada Dinas P3APPKB? Terlebih dalam melakukan perlindungan khusus anak di Kota Salatiga.	<i>Sebenarnya</i> sekarang sudah bagus ya Kak, karena aku pernah lapor dan ditangani. Mungkin kedepannya aku berharap Dinas P3APPKB bisa lebih banyak membantu anak-anak yang terkena kekerasan untuk lepas dari hal-hal buruk Kak. Soalnya anak kan masih kecil, makhluk yang rentan dan biasanya nggak bersalah. Yang salah kan lingkungan atau orang dewasa di sekitarnya, gitu Kak.
Baik terima kasih banyak Anastasya, informasi yang kamu sampaikan sangat membantu aku. Semoga kamu selalu diberi kelancaran dalam pendidikan dan berkegiatan.	Sama-sama Kak, lancar skripsinya dan semangat selalu ya Kak.

Lampiran 2. Dokumentasi Wawancara dengan Informan



Lampiran 3. Surat Izin Penelitian



PEMERINTAH KOTA SALATIGA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 Jalan Letjend. Sukowati Nomor 51 Salatiga, Kode Pos 50724 Telp. (0298) 325159
 Faks. (0298) 325159 Situs <http://bakesbangpol.salatiga.go.id>
 Surat elektronik bakesbangpol@salatigakota.go.id

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 000.9/1584

- I. Dasar :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 3 tahun 2018 tanggal 11 Januari tahun 2018 tentang Pedoman Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
 2. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor : SD. 6/ 6/ 2/ 12 tanggal 5 Juli 1972 tentang kegiatan Riset, Survei dan Keputusan Direktur Jendral Sosial Politik Nomor : 14 Tahun 1981 tentang Surat Pemberitahuan Penelitian (SPP) ;
 3. Keputusan Direktur Jendral Sosial Politik Nomor 14 Tahun 1981, tanggal 1 Februari 2021, tentang Surat Pemberitahuan Penelitian (SPP);
 4. Surat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro Semarang No. 1165/UN7.F7/PP/X/2023, tanggal 19 Oktober 2023 , Perihal permohonan Izin Penelitian;
- II. Yang bertandatangan di bawah ini Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Salatiga, menyatakan **Tidak Keberatan** atas pelaksanaan Penelitian dalam wilayah Kota Salatiga dengan analisa "Kegiatan ini tidak memiliki potensi ATHG terhadap masyarakat maupun Pemerintah Kota Salatiga, maka kegiatan ini dapat direkomendasikan untuk pembuatan surat keterangan penelitian" yang dilaksanakan oleh :
- a. Nama : Alfina Oktaviani
 - b. NIM/ NIP /NIK : 14010120120023
 - c. Pekerjaan : Mahasiswa
 - d. Program Studi : S1 Ilmu Pemerintahan - Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
 - e. Alamat : Tegalrejo RT 07 RW 003 Kelurahan Tegalrejo, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah
 - f. Penanggungjawab : Dr. Dra. Kushandajani, M.S
 - g. Maksud dan Tujuan : Melaksanakan penelitian dalam Penelitian Tugas Akhir dengan judul "Kota Layak Anak (KLA) Pada Klaster Perlindungan Khusus Di Kota Salatiga Dari Perspektif Evaluasi Kebijakan"
 - h. Lokasi : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Kota Salatiga
- Dengan Ketentuan – ketentuan sebagai berikut :**
- a. Sebelum melakukan kegiatan terlebih dahulu melaporkan kepada Pejabat Setempat/ Lembaga Swasta yang akan dijadikan obyek lokasi untuk mendapatkan petunjuk seperlunya dengan menunjukkan Surat Rekomendasi ini.
 - b. Pelaksanaan Penelitian tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan pemerintahan dan tidak membahas masalah politik dan/ atau agama yang dapat menimbulkan terganggunya stabilitas keamanan dan ketertiban.
 - c. Untuk penelitian yang mendapat dukungan dana dari sponsor baik dari dalam negeri maupun luar negeri, agar dijelaskan pada saat mengajukan perijinan.
 - d. Surat Rekomendasi dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila pemegang Surat Rekomendasi ini tidak mentaati/ mengindahkan peraturan dan atau melanggar hukum yang berlaku atau obyek penelitian menolak untuk menerima Peneliti.
 - e. Setelah Penelitian selesai supaya menyerahkan hasilnya kepada Badan Kesbang Pol Kota Salatiga.
- III. Surat Rekomendasi ini berlaku dari tanggal 25 Oktober 2023 s.d 25 Januari 2023

Dikeluarkan di Salatiga
 pada tanggal : 24 Oktober 2023

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 KOTA SALATIGA



Drs. V.T. HARIBOWO, M.M.
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19650410 198702 1 003

Tembusan:
 1. Walikota Salatiga (Sebagai laporan);
 2. Kepala BAPPEDA Kota Salatiga;
 3. Kepala DP3AP2KB Kota Salatiga

***Penerbitan surat Keterangan Penelitian ini tidak dipungut biaya



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS DIPONEGORO
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan dr. Antonius Suroyo
Kampus Universitas Diponegoro
Tembalang Semarang Kode Pos 50275
Telepon/Faksimile (024) 7465407
Laman: www.fsiip.undip.ac.id
Pos-el: [fsiip\[at\]undip.ac.id](mailto:fsiip[at]undip.ac.id)

Nomor : 1166 /UN7.F7/PP/X/2023
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

19 OCT 2023

Yth. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Jalan Hasanudin No. 110B
Kota Salatiga

Dalam rangka mempersiapkan penulisan skripsi pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro maka mohon izin untuk melaksanakan penelitian dan mengumpulkan data dengan melakukan wawancara kepada Bidang Kesejahteraan dan Perlindungan Anak (Bidang KPA) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Salatiga.

Adapun nama dan data mahasiswa sebagai berikut:

Nama : Alfina Oktaviani
NIM : 14010120120023
Judul : Kota Layak Anak (KLA) pada Klaster Perlindungan Khusus di Kota Salatiga dari Perspektif Evaluasi Kebijakan
Alamat Rumah : Jalan Tegalrejo I RT.07/ RW. 03 Kelurahan Tegalrejo, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga
Alamat email : alfinaoktaviani@students.undip.ac.id
No. HP : 0895620053726

Atas perkenan dan perhatiannya disampaikan terimakasih.



Dekan
Prof. Dr. Drs. Hardi Warsono, M.T
NIP. 196408271990011001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS DIPONEGORO
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan dr. Antonius Suroyo
Kampus Universitas Diponegoro
Tembalang Semarang Kota Pos 50275
Telepon/faksimile (024) 7465407
Laman: www.fisip.undip.ac.id
Pos-el: fisip[at]undip.ac.id

Nomor : 1791 /UN7.F7/PP/x1 /2023
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

21 NOV 2023

Yth. Ketua Yayasan Pesar – PEARL
Jalan Cemara Raya No. 7
Kota Salatiga

Dalam rangka mempersiapkan penulisan skripsi pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro maka mohon izin untuk melaksanakan penelitian dan mengumpulkan data dengan melakukan wawancara kepada Ketua atau Koordinator Yayasan Pesar – PEARL Kota Salatiga.

Adapun nama dan data mahasiswa sebagai berikut:

Nama : Alfina Oktaviani
NIM : 14010120120023
Judul : Kota Layak Anak (KLA) pada Klaster Perlindungan Khusus di Kota Salatiga dari Perspektif Evaluasi Kebijakan
Alamat Rumah : Jalan Tegalrejo I RT.07/ RW. 03 Kelurahan Tegalrejo, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga
Alamat email : alfinaoktaviani@students.undip.ac.id
No. HP : 0895620053726

Atas perkenan dan perhatiannya disampaikan terimakasih.



Prof. Dr. Drs. Hardi Warsono, M.T
NIP 196408271990011001

Lampiran 4. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian



PEMERINTAH KOTA SALATIGA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PELINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDU
DUK DAN KELUARGA BERENCANA

Jl. Hasanudin No.110 B Salatiga Kode Pos 50721 Telp.(0298)326063 Faks.
 (0298)314206 Situs <http://dp3appkb.salatiga.go.id>
 Surat Elektronik dp3appkb@salatiga.go.id

SURAT KETERANGAN MELAKUKAN PENELITIAN

NOMOR : 400.7.22.1/2096

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : YUNI AMBARWATI, SH.
 NIP : 196506071992032008
 Jabatan : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak,
 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Salatiga

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Alfina Oktaviani
 NIM : 14010120120023
 Program Studi : S1-Ilmu Pemerintahan
 Perguruan Tinggi : Universitas Diponegoro Semarang

Yang bersangkutan telah Melakukan Penelitian dalam rangka penyusunan Skripsi dengan judul "**Kota Layak Anak (KLA) pada Klaster Perlindungan Khusus di Kota Salatiga dari Perspektif Evaluasi Kebijakan**" dalam bentuk pengambilan data yang dilaksanakan sejak tanggal 15 November s.d 17 November 2023 pada Bidang Kesejahteraan Pelindungan Anak. Dengan dikeluarkannya Surat ini menyatakan bahwa mahasiswa diatas sudah menyelesaikan tugasnya dengan baik.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya .

Salatiga, 14 Desember 2023
 KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
 PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK,
 DAN KELUARGA BERENCANA



YUNI AMBARWATI, S.H.
 NIP. 196506071992032008



Yayasan Peduli Setiap Insan (PESAN)
 AKTA NOTARIS tanggal 28 Pebruari No.90
 Nomor AHU-0003259.AH.01.04.Tahun 2018
 Jl. Cemara Raya No.7, Kec. Sidorejo, Kel. Sidorejo Lor, Salatiga 50714
 Email: yayasanpesan@gmail.com
 HP. 0813-2824-4465

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Prima Riani Cahyaningrum
 Jabatan : Sekretaris
 Instansi : Yayasan Peduli Setiap Insan (PESAN) – Salatiga

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Alfina Oktaviani
 NIM : 14010120120023
 Universitas/ Sekolah : Universitas Diponegoro
 Fakultas : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
 Program Studi : Ilmu Pemerintahan
 Judul Penelitian : Kota Layak Anak (KLA) pada Klaster Perlindungan
 Khusus di Kota Salatiga dari Perspektif Evaluasi
 Kebijakan

Adalah benar telah melakukan penelitian dalam rangka penulisan skripsi dengan judul tersebut pada tanggal 27 November 2023 bertempat di Kantor Yayasan Pesan – PEARL Kota Salatiga.


 Sekretaris Yayasan PESAN
 Prima Riani Cahyaningrum